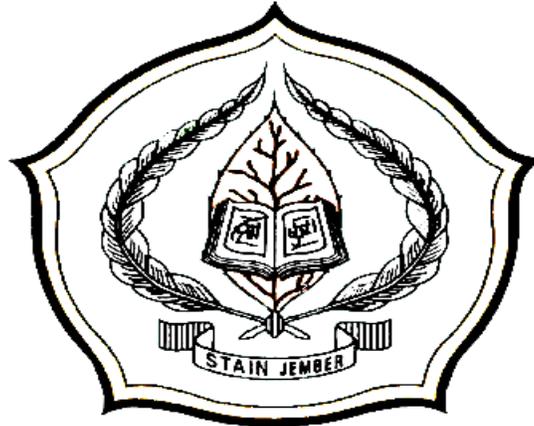


**IMPELEMTASI KEBIJAKAN PESANTREN DALAM MENOLAK KEBERADAAN
*HYPERMARKET***

(Study Kasus di Pondok Pesantren ASHRI Talangsari Jember)



Oleh:

**Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JEMBER
2013**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

- 1 a. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pesantren dalam Menolak Keberadaan Hypermarket (Studi Kasus PONPES ASHRI Talangsari Jember)
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial
- c. Kategori Penelitian : Individual
- 2 Peneliti
- a. Nama Lengkap : Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos M..Si
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Gol./NIP. : Lektor /III C/197509052005012003
- d. Jabatan Sekarang : Lektor
- e. Jurusan : Dakwah
- f. Program Studi : Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI)
- 3 Lokasi Penelitian : Jember
- 4 Lama Penelitian : 4 bulan (Juli - Oktober 2013)
- 7 Biaya yang Diperlukan : 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Mengetahui
Kepala P3M

Peneliti

MOCH. CHOTIB, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

Nurul Widyawati IR.S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003

Menyetujui,
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto
NIP. 19660322 199303 1 002

ABSTRAK

Sejak awal pesantren didirikan untuk merawat dan melestarikan ilmu-ilmu keislaman abad pertengahan sebagai acuan perilaku keberagamaan umat. Dalam bingkai pelestarian ini pesantren memerankan tiga fungsi konvensional. Pertama, pesantren berfungsi sebagai media transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman. Penularan ilmu-ilmu keislaman di pesantren dilakukan dengan berbagai cara yang sudah mentradisi dan khas ala pesantren. Kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan tradisi Islam.

Pada umumnya pesantren selalu menanamkan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan suka rela. Nilai tersebut boleh dikatakan menjiwai hampir semua aktivitas pesantren. Tidak terkecuali Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Pesantren yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Putri Talangsari ini dalam kegiatan ekonominya selalu menekankan dan mengedepankan pengabdian dan ikhlas. Para karyawan di sektor perekonomian selalu dituntut untuk memurnikan niat, mengabdikan pada pesantren. Pengabdian identik dengan bekerja tanpa pamrih, tidak memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh.

Makna pengabdian selalu berdampingan dengan ikhlas. Pengabdian dan keikhlasan idealnya merupakan spirit yang positif. Keduanya merupakan pekerjaan hati yang tak bisa dijangkau panca indra. Namun, spirit ini akan terlihat dalam kerja konkret, tindakan nyata. Di samping itu, Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember mencoba untuk tidak mengadopsi kegiatan ekonomi modern, dengan tidak beranjak meninggalkan sumber ekonomi yang mengandalkan pertanian atau ekonomi agraris sebagaimana pesantren pada awal berdirinya. Pada masa awal sumber ekonomi pesantren bertumpu pada hasil panen pertanian, sebab kiai pada umumnya adalah golongan menengah kaya dan memiliki tanah.

Fenomena yang terjadi di bidang kebijakan pesantren ini adalah menolak berdirinya keberadaan *Hypermarket* atau toko modern yang lagi menjamur di Kabupaten Jember. Banyak kalangan yang terkejut dengan berdirinya *Hypermarket* di area kompleks sekitar pesantren tersebut sehingga melakukan sebuah aksi penolakan yang dipimpin oleh pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Syaif).

Adapun focus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant) yang ada di lingkungan Pesantren ? dan 2). Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant)?

Tujuan yang ingin di capai adalah mengetahui implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant). Dengan berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar mendukung implementasi kebijakan pesantren Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant). Dinamika pesantren yang bernafaskan religiusitas yang tinggi memberikan pengaruh yang kuat untuk bisa mengimplementasikan kebijakan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* (Giant) yang ada di lingkungan pesantren.

Dengan mengetahui sumber-sumber kebijakan penolakan berdirinya *Hypermarket* (Giant) ini akan terbaca bagaimana masa depan perkembangan pesantren dilihat dari sisi religiusitasnya. Sehingga strategi, kebijakan, dan langkah-langkah ke arah yang lebih baik bisa dipersiapkan dan diupayakan sejak dini.

Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pertimbangan bahwa

dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran tentang *Kebijakan Pesantren dalam Menolak Berdirinya Hypermaket (Giant) di Pondok Ashri Talangsari Kabupaten Jember*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Hal itu didasarkan pada fenomena bahwa banyak terjadi benturan antar pondok pesantren, masyarakat yang pro maupun kontra, juga dengan dinas terkait dan juga banyak mengandung muatan politik dalam menyelesaikan konflik penolakan tersebut. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari ternyata banyak faktor yang tidak mendukung implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang di lakukan oleh pondok pesantren Ashri Talangsari, dan lingkungan masyarakatpun juga kurang mendukung sehingga kualifikasinya kurang baik. Oleh karena itu wajar jika implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang di lakukan oleh pondok pesantren Ashri Talangsari tidak berjalan dengan baik

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya tulisan ini, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada pemimpin umat yakni Nabi Muhammad saw. yang telah memberi jalan penerang bagi cahaya kehidupan.

Upaya penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan untuk berkarya dalam upaya meningkatkan sumber daya tenaga pengajar di lingkungan STAIN Jember
2. K.MA. Saiful Rizal AS (Gus Syaif) yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk dijadikan informan inti dalam penelitian ini.
3. Semua kawan dosen dan karyawan di lingkungan STAIN Jember yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan penelitian ini
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun pihak lain khususnya para pemangku kebijakan public , serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, Nopember 2013

Penyusun

Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan dan Kegunaan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Penelitian Terdahulu	8
II.2. Filosofi Pesantren	10
II.3. Implementasi Kebijakan	15
BAB III: METODE PENELITIAN	
III.1. Paradigma Penelitian	31
III.2. Pilihan Paradigma	35
III.3. Metode Penelitian	36
III.4. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data	37
III.5. Sumber Data	38
III.6. Teknik Pengolahan Data	38
III.7. Daerah Penelitian	39
III.8. Unit Analisis	39
III.9. Pengalaman Lapang	40
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
IV.1. Gambaran Obyek Penelitian	41
IV.2. Penyajian Data	44
2.1 Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri Terhadap Penolakan Berdirinya <i>Hypermarket (Giant)</i> di Talangsari	44
2.2. Faktor Pendukung Impelemntasi Kebijakan Pondok Pessantren Ashri dalam Menolak berdirinya <i>hypermarket</i> Giant di Taalangsari	46
2.3. Faktor Penghambat Impelemntasi Kebijakan Pondok Pessantren Ashri dalam Menolak berdirinya <i>hypermarket</i> Giant di Taalangsari	48
IV.3. Analisis Data	50
3.1. Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri Terhadap Penolakan Berdirinya <i>Hypermarket (Giant)</i> di	

Talangsari	50
3.2. Agenda bupati Jember	51
3.3. Tim Pendirian Hypermarket	52
3.4. Mekanisme Penolakan berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant)	52
3.5. Faktor Penghambat Impelementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam Menolak berdirinya <i>hypermarket</i> Giant di Taalangsari	59
3.5.1 Faktor Komunikasi	59
3.5.2. Faktor Sumber-sumber	60
3.5.3. Faktor Disposisi	62
3.5.4. Faktor Struktur Birokrasi	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1 Kesimpulan	66
V.2 Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak awal pesantren didirikan untuk merawat dan melestarikan ilmu-ilmu keislaman abad pertengahan sebagai acuan perilaku keberagamaan umat. Dalam bingkai pelestarian ini pesantren memerankan tiga fungsi konvensional. Pertama, pesantren berfungsi sebagai media transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman. Penularan ilmu-ilmu keislaman di pesantren dilakukan dengan berbagai cara yang sudah mentradisi dan khas ala pesantren. Kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan tradisi Islam. Pada fungsi kedua ini pesantren menjadi semacam ‘dapur pengawet’ ilmu-ilmu keislaman zaman klasik.

Buku-buku yang ditulis oleh ulama’ salaf (terdahulu) atau yang biasa disebut dengan kitab kuning menjadi ‘menu’ wajib dalam kurikulum pendidikannya. Penguasaan terhadap hazanah klasik menjadi ciri khas yang harus dimiliki oleh para santri dan alumni pesantren. Bahkan, minimnya penguasaan terhadap kitab kuning dianggap sebagai santri yang kurang berhasil dalam menimba ilmu dan ‘tidak pantas’ menyandang status santri. Fungsi pesantren yang ketiga adalah reproduksi ulama’. Pesantren menjadi semacam barometer ketokohan seorang ulama’ sekaligus sebagai media ‘pencetus’ lahirnya ulama’ baru. Seberapa banyak dari alumninya yang menjadi panutan di kalangan masyarakat sekitar, maka semakin dipertimbangkan pula posisi pesantren tersebut di mata masyarakat. Para santri di kemudian hari pasca

keluar dari pesantren akan mengikuti jejak kiainya dengan mendirikan pesantren di daerah masing-masing setelah mendapat pengakuan dari masyarakat setempat.

Para alumni ini berperan sebagai ulama’-ulama’ baru jebolan pesantren sekaligus memperkokoh posisi pesantren asalnya. Oleh karena itu, pesantren berfungsi sebagai ‘pabrik’ yang memproduksi ulama’-ulama’ baru. Di samping itu, pesantren juga berfungsi sebagai basis institusionalisasi kiai. Dengan mendirikan pesantren, seorang kiai semakin diakui otoritasnya di kalangan masyarakat muslim dari pada kiai yang belum mampu mendirikan pesantren. Masyarakat muslim akan mengkonsepsikan sebagai tokoh kharismatik terhadap kiai yang mengasuh pesantren besar dengan ribuan santri yang berjibun.

Jumlah kuantitatif santri akan berpengaruh terhadap ketokohan dan kharisma seorang kiai di mata masyarakat umum. Kebesaran dan ketenaran pesantren menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk menyerahkan putra-putri mereka menjadi anak asuh.

Dengan demikian, pesantren dengan tokoh kiainya menduduki posisi penting di tengah masyarakat Muslim. Bahkan, peran kiai menjangkau batas wilayah di luar keagamaan. Otoritas mereka terkadang menyentuh wilayah-wilayah ‘duniawi’ yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan paralel dengan (pendidikan) agama yang menjadi garapannya. Oleh karena itu, berbagai istilah muncul yang dialamatkan terhadap kiai dengan berbagai peran yang dimainkannya. Begitu sangat penting peran dan posisi kiai di tengah-tengah masyarakat Muslim, hingga seorang peneliti Clifford Getz menyematkan sebutan “pialang budaya/makelar budaya” (cultural broker) bagi tokoh yang satu ini.

Akan tetapi, hal yang paling penting dari semua peran adalah berdasar pada kiprah mereka di dunia pendidikan. Peran dalam pendidikan ini sangat sentral, mengingat melalui wilayah inilah khususnya pesantren dan kiai menjalankan peran utamanya sebagai perumus keberagaman masyarakat. Melalui pesantren, kiai bertindak sebagai “penerjemah” doktrin-doktrin keislaman yang menjadi acuan masyarakat awam.

Di zaman yang serba modern, lembaga dengan label tradisional ini tetap kokoh dan terbukti eksis bertahan meskipun harus melakukan pembenahan di sana-sini. Tantangan demi tantangan dalam perjalanan sejarahnya, terutama pada awal menapaki abad 20 di mana kaum reformis atau modernis muslim menuntut perubahan sistem dalam pendidikan Islam, mampu dihadapi pesantren dengan berbagai penyesuaian, sehingga keberadaannya tetap dipertimbangkan dan eksis hingga sekarang.

Terlepas dari lintasan sejarah dengan berbagai perubahan di dalamnya, terbukti pesantren tetap bertahan ‘menantang’ gilasan zaman. Terdapat tiga kekuatan yang menjadi penopang mengapa pesantren tetap eksis sampai saat ini. Pertama, kekuatan tradisi keilmuannya yang sangat kokoh dalam mempertahankan warisan ulama’ terdahulu (turats) yang tersebar dalam lembaran-lembaran kitab kuning. Kesetiaan terhadap warisan itulah yang pada gilirannya akan membentuk kharisma kiai. Tidak sedikit kajian-kajian literature yang menjadi ‘santapan’ sehari-hari di pesantren mengharuskan penghormatan khusus dan terkadang berlebihan terhadap sosok kiai. Salah satunya adalah kitab Ta’limul Muta’allim yang menjadi pegangan wajib santri hampir di semua pesantren. Tidak hanya itu, faktor lain yang ikut menyumbang asupan charisma adalah

pribadi-pribadi alumninya yang mempunyai kedudukan terhormat di mata masyarakat.

Dua hal tersebut satu sama lain saling menopang dalam pembentukan citra kharisma. Kedua, adanya pengikut atau trust dari masyarakat melalui pengiriman santri untuk belajar di pesantren. Pilar yang kedua ini sebagai konsekuensi dari yang pertama, mengingat kharisma menjadi 'magnet' yang mampu menyedot kepercayaan masyarakat terhadap sosok seorang tokoh. Bisa dibayangkan jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, lambat laun jumlah santri akan menurun. Penurunan jumlah kuantitas santri akan mengancam eksistensi pesantren ke depan. Lalu, pada akhirnya akan menyebabkan pesantren 'gulung tikar'. Pilar ketiga yang menjadi kekuatan penopang pesantren tetap eksis hingga sekarang dikarenakan faktor pendanaan yang terus mengalir ke pondok pesantren. Faktor yang terakhir ini menjadi tonggak keberlangsungan hidup pesantren, meskipun dua faktor sebelumnya bukan berarti diabaikan. Ketiga kekuatan tersebut tentu saling terkait satu sama lain, namun faktor terakhir menjadi kekuatan penentu geliat nafas kehidupan bagi pesantren. Eksistensi dan keberlanjutan pesantren ditentukan oleh faktor ketiga ini.

Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk membiayai dirinya agar tetap eksis. Tentu harus didukung dengan strategi-strategi jitu agar dapat menghidupi segala proses yang berlangsung di dalamnya. Pendek kata, pesantren harus melakukan penataan dan manajemen ekonomi secara proporsional agar menjadi mesin penggerak yang efektif dan efisien. Akan tetapi, penataan serta pengelolaan ekonomi haruslah berangkat dari suatu pijakan dan konsep yang menjadi landasan bertumpu. Beranjak dari titik pijak ini segala aktivitas ekonomi digerakkan dan dipantulkan dalam tataran

praksis. Corak serta model pengembangan sektor ekonomi sangat tergantung terhadap pilihan ideology disadari ataupun tidak yang menjadi penggerak. Landasan bertumpu inilah yang sering kita sebut dengan spirit, atau dalam bahasa sederhana diungkapkan dengan kata "semangat". Idealnya, spirit harus selalu mengiringi dan menjadi ruh dalam setiap tindakan. Spirit harus mengejewantah dalam perbuatan kongkret. Pada titik ini sinkronisasi spirit dengan tindakan nyata dibutuhkan. Ketersambungan dan kerjasama dialektis antara spirit dan tindakan akan menjadi kekuatan manajerial. Oleh karenanya, dalam konteks kegiatan ekonomi keberadaan spirit menjadi penting guna menentukan suatu keberhasilan. Tesis Weber tentang etika Protestan yang menjadi semangat berkembangnya ekonomi bercorak kapitalis merupakan pembenar betapa sebuah kebijakan sangat menentukan..

Pada umumnya pesantren selalu menanamkan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan suka rela. Nilai tersebut boleh dikatakan menjwai hampir semua aktivitas pesantren. Tidak terkecuali Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Pesantren yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Putri Talangsari ini dalam kegiatan ekonominya selalu menekankan dan mengedepankan pengabdian dan ikhlas. Para karyawan di sektor perekonomian selalu dituntut untuk memurnikan niat, mengabdikan pada pesantren. Pengabdian identik dengan bekerja tanpa pamrih, tidak memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh.

Makna pengabdian selalu berdampingan dengan ikhlas. Pengabdian dan keikhlasan idealnya merupakan spirit yang positif. Keduanya merupakan pekerjaan hati yang tak bisa dijangkau panca indra. Namun, spirit ini akan terlihat dalam kerja konkret, tindakan nyata. Di samping itu, Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember mencoba untuk tidak mengadopsi kegiatan ekonomi modern, dengan tidak beranjak meninggalkan sumber ekonomi yang mengandalkan pertanian atau ekonomi agraris sebagaimana pesantren pada awal berdirinya. Pada masa awal sumber ekonomi pesantren bertumpu pada hasil panen pertanian, sebab kiai pada umumnya adalah golongan menengah kaya dan memiliki tanah.

Dengan bertambahnya kebutuhan pesantren yang semakin kompleks mengandalkan ekonomi pertanian tentunya tidak lagi memadai. Namun pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari masih tetap survive dengan pola pikir lama. Fenomena yang terjadi di bidang kebijakan pesantren ini adalah menolak berdirinya keberadaan *Hypermarket* atau toko modern yang lagi menjamur di Kabupaten Jember. Banyak kalangan yang terkejut dengan berdirinya *Hypermarket* di area kompleks sekitar pesantren tersebut sehingga melakukan sebuah aksi penolakan yang dipimpin oleh pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Syaif). Toko Modern yang oleh aktivis sosial diidentikkan dan menjadi icon ekonomi kapitalis saat ini merambah lingkungan pesantren. Ada apa dengan kebijakan pesantren?. Jiwa pengabdian dan keikhlasan yang selalu ditanamkan dalam realita praktiknya akankah menumbuhkan ekonomi bercorak elit, tidak merakyat. Pesantren yang penuh nilai-nilai kesederhanaan seolah bertolak belakang dengan kemegahan dan ke-mentereng-an tampilan *Hypermarket*. Oleh karena itu, sebagai pesantren yang sudah terlanjur diklaim penuh kharismatik, mencoba tetap survive dengan gerakan penolakan berdirinya *Hypermarket* yang sudah melalui tahap pembangunan gedung *Hypermarket*. Pemangku kebijakan (Kyi) dalam hal ini mencoba melakukan aksi protes ke pendopo Kabupaten untuk menunjukkan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket*. Namun

diketahui belakang hari aksi tersebut yang semula di dukung oleh warga sekitar Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember berubah menjadi aksi pendukung terhadap berdirinya *Hypermarket* di lingkungan Pondok Pesantren Asri Talangsari Kabupaten Jember.

Dukungan warga yang semula diberikan sepenuhnya pada pemangku kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari Jember berubah dengan perkembangan waktu menjadi mendukung berdirinya *Hypermarket* di lingkungan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Hal inilah yang menarik untuk di jadikan sebuah penelitian. Fenomena kegigihan dan keuletan pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember untuk melakukan aksi penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* menjadi sentra utama dari penelitian ini. Di samping itu factor factor yang menghambat implementasi kebijakan pesantren dalam melakukan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* juga yang ingin di urai dalam penelitian ini.

I.2. Rumusan Masalah

Pesantren yang dipersepsikan sebagai lembaga ‘sakral’ bukan berarti tidak mengikuti hukum-hukum alamiah sebagaimana lembaga pada umumnya. Perilaku-perilaku di dalamnya tentu mengikuti syarat-syarat obyektif lazimnya sebuah lembaga. Dengan begitu, kajian sosiologis dari berbagai aspeknya perlu menjadi sebuah metode pendekatan dalam mengkaji pesantren. Oleh karena itu, penulis hendak merumuskan pertanyaan yang akan menjadi fokus studi ini, yaitu:

1. Bagaimana Impelemntasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant) yang ada di lingkungan Pesantren ?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant)?

I.3. Tujuan dan Kegunaan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi kebijakan yang menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan Pondok Pesantren Asri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket*. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama (Islam) dan nilai-nilai yang dikedepankan pesantren seharusnya memberikan dampak positif dalam penentuan kebijakan. Tindakan dan perilaku para pemangku kebijakan pesantren apakah berlandas-tumpu pada ajaran keagamaan..

Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant). Dengan berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar mendukung implementasi kebijakan pesantren Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak berdirinya *Hypermarket* (Giant). Dinamika pesantren yang bernafaskan religiusitas yang tinggi memberikan pengaruh yang kuat untuk bisa mengimplementasikan kebijakan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* (Giant) yang ada di lingkungan pesantren.

Dengan mengetahui sumber-sumber kebijakan penolakan berdirinya *Hypermarket* (Giant) ini akan terbaca bagaimana masa depan perkembangan pesantren dilihat dari sisi religiusitasnya. Sehingga strategi, kebijakan, dan langkah-langkah ke arah yang lebih baik bisa dipersiapkan dan diupayakan sejak dini. Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praksis. Dalam hal akademik, penelitian ini akan berguna sebagai basis data untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Secara praksis penelitian ini akan berguna sebagai rujukan bagi penentu kebijakan pesantren dan bahan evaluasi untuk selalu mengadakan perbaikan-perbaikan demi keberlangsungan eksistensi pesantren ditengah arus perkembangan zaman. Tidak kalah penting studi ini juga diharapkan menjadi bahan renungan untuk membenahi atau bahkan mencari factor yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Sebab bidang ini menjadi salah satu pilar penopang ‘nafas kehidupan’, baik pesantren maupaun lembaga-lembaga lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dibahas tentang berbagai pustaka yang mengkaji tentang pesantren dari berbagai aspeknya. Sudah banyak buku-buku dan penelitian yang mengkaji tentang pesantren terutama sejak diterbitkannya hasil penelitian Dhofier pada tahun 1980. Setelah tahun ini perhatian para sosiolog dan antropolog mulai menunjukkan geliatnya pada dunia Islam tradisional (pesantren).

Penelitian yang dilakukan oleh Dhofier ini mengambil studi lapangan atas dua lembaga pesantren Tebuireng di Jombang dan Tegalsari di Salatiga. Buku dengan judul “Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai” yang merupakan disertasi Dhofier ini mempunyai fokus bahasan utama tentang peranan kiai dalam memelihara dan mengembangkan paham Islam tradisional di Jawa. Buku ini hanya bermaksud menggambarkan dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren. Dhofier hanya mengemukakan dan membuktikan bahwa pesantren tetap menunjukkan vitalitasnya sebagai kekuatan sosial, kultur dan keagamaan yang turut andil dalam membentuk pola kebudayaan Indonesia. Sama sekali buku ini tidak menyinggung sisi ekonomi pesantren, baik kebijakannya maupun atau tatakelolanya.

Hasil penelitian lain tentang pesantren dilakukan oleh seorang sarjana Jerman, Manfred Ziemek pada tahun 1983. Hasil penemuan Manfred ini kemudian diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dengan judul “Pesantren dalam Perubahan Sosial”. Kalau Dhofier lebih memfokuskan objek kajiannya pada sosok kharisma kiai dalam memelihara dan mengembangkan Islam tradisional di Jawa, sementara Manfred banyak berbicara perihal peran dan fungsi pesantren bagi proses pengembangan masyarakat khususnya di kawasan pedesaan Indonesia. Buku ini memiliki focus kajian tentang bagaimana pesantren berperan sebagai pusat pengembangan masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah Orde Baru yang mempunyai program pembangunanisme saat itu. Buku ini tetap tidak berbicara bagian ‘dalam’ pesantren dalam arti ruh ekonominya, tetapi lebih berbicara pesantren hubungannya dengan ‘luar’, pengembangan masyarakat.

Penelitian dengan mengambil tema pesantren juga dilakukan oleh Endang Turmudi pada

tahun 1993. Penelitian ini memilih Jombang sebagai lokasi dengan tiga pesantren yang menjadi pusat studinya, yaitu pesantren Darul Ulum, pesantren Tebuireng, dan pesantren Bahrul Ulum. Pada tahun 2004 hasil studi ini dipublikasikan dalam bentuk buku di bawah judul “Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan” oleh penerbit LKiS Yogyakarta. Buku ini memberikan fokus studi pada dunia kiai dan pesantren, dengan membidik hubungan antara kiai dengan situasi sosial dan politik. Secara spesifik buku ini ingin mengetengahkan dan menguji sejauh mana peran kiai dalam mempengaruhi aksi sosio-politik umat Islam. Pada dasarnya buku ini juga mengambil fokus kiai sebagai objek kajian tidak memberi perhatian lebih pada lembaga pesantrennya. Walaupun studi Turmudi ini juga membahas keterlibatan kiai dalam dunia politik praktis, namun tidak mengambil sisi keberuntungan ekonomis dari politik sebagai salah satu penyanggah income bagi pesantren. Oleh karena itu, sisi ekonomi pesantren sama sekali belum tersentuh.

Penelitian lebih spesifik terhadap pesantren Sukorejo dilakukan Tim Peneliti yang diketuai oleh Dudung Abdurrahman. Namun, secara khusus penelitian ini hanya mengambil salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, yaitu Ma’had Aly. Sebuah lembaga yang berkonsentrasi pada kajian Fiqh dan Ushul Fiqh untuk merespons persoalan. Model persoalan fiqh kontemporer.

Fokus penelitian yang berjudul Pengembangan Ma’had Aly: Studi Kasus Beberapa Pesantren di Jawa ini adalah menelaah dan mencari model pesantren Ma’had Aly serta peran dan kontribusinya terhadap masyarakat. Obyek penelitian ini mengambil model Ma’had Aly yang terdapat pada tiga pesantren: Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat; Al-Mukmin Ngruki Surakarta Jawa Tengah; Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur.

Secara detail fokus penelitian ini mengungkapkan karakteristik dan konsep pendidikan Ma’had Aly pada pesantren-pesantren yang ada di Jawa, pola pengembangan Ma’had Aly dalam mencetak ulama’ dan memberikan respons terhadap masalah-masala keagamaan aktual, serta alasan mengapa pengembangan Ma’had Aly berbeda antar pesantren, dan kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Sisi ekonomi belum menjadi bahasan dalam studi ini.

Penelitian lain tentang Ma’had Aly Situbondo dilakukan oleh Imam Malik. Malik mengambil fokus pada fiqh sebagai metode alternatif dialog antar agama yang dikembangkan oleh Ma’had Aly. Studi ini juga mengkaji tentang dinamika Ma’had Aly dan strategi gerakannya sebagai lembaga kader ahli fiqh yang konsen dalam pengembangan dialog antar agama.⁶ Tesis

yang ditulis oleh Muqit Ismail juga berbicara Ma'had Aly dalam kaitannya dengan pengembangan intelektualitas santri. Ma'had Aly dalam tesis Muqit mempunyai peran yang signifikan dalam pengembangan intelektualitas dan wawasan inklusif santri. Berbagai penelitian yang mengambil obyek Pesantren Sukorejo belum ada yang mengkaji tentang ekonomi sebagaimana yang penulis teliti. Sejauh ini penelitian tentang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo lebih banyak terfokus pada aspek pendidikan dan pengembangan yang mengarah pada wacana keilmuan.

II.2. Filosofi Pesantren

Secara kasat mata, pesantren adalah dunia yang penuh dengan aktivitas religius. Seluruh kegiatan diarahkan pada peningkatan spiritual. Mulai dari shalat malam, shalat berjamaah, serta kegiatan-kegiatan lain yang bernuansa ilahiyah. Hal itu merupakan cerminan bahwa pesantren dengan tokoh kiainya menjadi acuan rumusan keberagaman masyarakat. Tidak diragukan lagi pesantren dianggap sebagai induk pemahaman agama (Islam), karena keseharian perilaku pesantren merupakan aktualisasi dari hasil pemahaman keagamaan tersebut. Sehingga bisa dibayangkan pesantren lebih banyak menginternalisasi ajaran-ajaran keislaman. Penghayatan dan pemahaman secara kontinyu akan memberikan corak dominan yang mewujud dalam perilaku masyarakat pesantren. Asumsi seperti di atas membawa pada kesimpulan sementara bahwa segala tindak-tanduk dan perilaku pesantren didasarkan atas pertimbangan agama secara dominan.

Sampai di sini agama mempunyai peran penting dan dapat menjadi spirit bagi segala aspek kehidupan pesantren. Tesis Weber tentang etika Protestan yang berpengaruh terhadap perilaku ekonomi kapitalis modern bisa dipinjam menjadi analisis studi ini. Dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* Weber menyebutkan bahwa agama (Kristen-Protestan) mempunyai peran penting dalam perkembangan kapitalisme modern. Melalui penelitian yang dilakukan di Jerman terhadap beberapa pemimpin perusahaan, pemilik modal, dan personil teknis dan komersial tingkat atas yang kesemuanya penganut Protestan, Weber mengenalkan satu tesis bahwa ajaran agama yang dianut mempengaruhi tingkat pencapaian dalam usaha-usaha ekonomi.

Observasi Weber juga berlanjut pada negeri-negeri yang beragama campuran. Dari observasi ini semakin memperjelas bahwa golongan Protestan secara prosentase menduduki

tempat yang teratas. Dengan kata lain, golongan ini tampaknya lebih berani meninggalkan kungkungan tradisionisme ekonomi. Fakta tersebut mendorong Weber untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dari sisi intern. Selanjutnya, Weber menjelaskan hakikat dan kemunculan mentalitas baru yang dia sebut sebagai semangat kapitalisme. Menurutnya, semangat inilah yang menggantikan tradisionisme dalam ekonomi. Semangat kapitalisme ini yang kemudian menjadi aspek sentral dalam perkembangan kapitalisme modern.

Dalam hal ini, konsep semangat didefinisikan sebagai suatu jenis tindakan sosial yang melibatkan pengejaran keuntungan maksimum dengan perhitungan rasional. Mentalitas ini berhubungan dengan berbagai unsur nilai seperti hemat, rajin dan asketisme atau menahan diri dalam persoalan ekonomi. Mentalitas ini berkebalikan dengan apa yang disebut dengan mentalitas tradisionisme ekonomi yang berorientasi mengejar tujuan, bukannya mengejar keuntungan maksimum secara rasional. Melalui penemuan tesisnya ini Weber membalik teori Marx yang menyatakan bahwa kondisi riil ekonomi yang mempengaruhi ideologi-ideologi seperti agama. Dengan nada menyentil Weber menulis: “ajaran yang dianut yang sesungguhnya merupakan suatu kegiatan ruhaniah tidak bisa dianggap sebagai suatu refleksi dari kondisi material dari super struktur yang ideal”, Weber melanjutkan, “kekuatan pengaruh agama yang menciptakan perbedaan-perbedaan yang kita sadari sekarang”. Untuk menjawab pertanyaan, apakah doktrin agama yang memungkinkan berkembangnya semangat kapitalisme, Weber mengawali studinya dengan menganalisis doktrin teologis dari beberapa aliran Protestan. Terdapat empat aliran utama Protestan yang menjadi perhatian Weber, yaitu: Calvinisme, Baptisme, Metodisme, dan Kesalehan (Pietism). Namun, analisis dipusatkan pada satu aliran Calvinisme yang dianggap banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan semangat kapitalisme. Ajaran Calvin tentang takdir dan nasib manusia di hari nanti, menurut Weber, menjadi kunci utama yang memngilhami sikap hidup dari para penganutnya.

Takdir manusia telah ditentukan sebelumnya, keselamatan diberikan oleh Tuhan terhadap orang yang terpilih. Dengan begitu, sesungguhnya manusia berada dalam ketidakpastian yang abadi, apakah ia termasuk dalam golongan terpilih tersebut? Tetapi, adalah kewajiban untuk beranggapan bahwa ia merupakan salah satu yang terpilih, serta berusaha menepis segala keraguan, karena ketidakpercayaan diri berarti berkurangnya rahmat dari Tuhan. Konsekuensi berikutnya, jika rahmat Tuhan berkurang, maka hal ini menjadi pertanda bahwa ia bukanlah

golongan orang yang terpilih.

Oleh karena itu, seorang Calvinis harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terpilih. Untuk memupuk percaya diri inilah maka manusia harus kerja keras, sebab kerja keras menjadi jalan satu-satunya untuk menghilangkan keraguan religius dan akan memberikan kepastian akan rahmat Tuhan. Keberhasilan di dunia menjadi cermin ke-terpilih-an di akhirat. Kegiatan duniawi yang serius dianggap sebagai cara-cara yang pantas untuk mengembangkan dan mempertahankan rasa percaya diri ini, dan dengan demikian menunjukkan keterpilihan mereka dengan keberhasilan duniawi.

Dorongan bekerja keras tersebut bukanlah semata-mata untuk menyambung keberlangsungan hidup, tetapi merupakan suatu ‘panggilan’ (beruf, calling). Panggilan ini harus dipenuhi setiap hari agar lebih dekat dengan penyelamatan (surga). Dalam artian, bekerja merupakan tugas suci yang menjadi bagian dari doktrin agama; keberhasilan kerja di dunia menumbuhkan percaya diri bahwa ia adalah salah seorang yang ‘terpilih’. Kegiatan duniawi dianggap memiliki makna keagamaan. Oleh sebab itu, dalam doktrin Protestan, panggilan bukan sekedar pekerjaan atau kesibukan. Panggilan merupakan suatu kewajiban agama, takdir Tuhan yang diresapi secara sungguh-sungguh yang disertai cara hidup hemat dan lain-lain.

Orientasi ini pada gilirannya akan membentuk pola tingkah laku yang disebut dengan Etika Protestan. Etika ini terserap dalam semua benak pemeluknya yang kemudian melahirkan apa yang oleh pengikut Weber diistilahkan dengan ‘etos’. Begitulah aspek penting dalam etika Protestan. Makna ibadah (mengagungkan Tuhan) terletak dalam kerja keras. Maka bermalas-malas menjadi sesuatu yang tak disukai Tuhan, sehingga harus dibuang jauh-jauh. Dari pada berdiam diri lebih baik memenuhi panggilan Tuhan melalui kerja.

Di sisi lain, etika Protestan juga menganjurkan untuk menghemat, tidak erfoya-foya, melakukan pembatasan konsumsi. Bisa dibayangkan apabila konsep kemauan kerja keras dikombinasikan dengan sikap pembatasan dan pola hidup hemat akan menghasilkan keinginan yang kuat untuk menabung. Demikianlah Weber menunjukkan dinamika internal tingkah laku keagamaan, paling tidak sebagian, dipengaruhi oleh etos. Dan pada tahap berikutnya akan menimbulkan semangat kapitalisme. Pesantren sebagai pusat segala dimensi keagamaan (Islam), apakah dalam kegiatan ekonominya juga tersokong oleh spirit keislaman, merupakan pertanyaan yang penting untuk dicari jawabnya.

Dalam penelitian ini juga penting memasukkan teori yang dapat mengakomodasi

pembacaan eksternal. Jika teori Weber hanya menganalisis dorongan internal, maka perlu ada pembacaan yang lebih mengarah pada kondisi-kondisi luar seperti struktur, posisi dan peranan. Dalam hal ini peneliti meminjam teori strukturalisme konfliknya Ralf Dahrendorf yang dibangun dan merupakan

pembenahan terhadap teori Karl Marx. Dahrendorf membangun teorinya dengan separuh penolakan, separuh penerimaan serta modifikasi teori sosiologis Karl Marx.

Dalam teori kelasnya Marx menyatakan bahwa masyarakat terbagi atas dua kelas: borjuis dan proletar. Pembagian dua kelas ini didasarkan atas kepemilikan sarana-sarana produksi. Berdasarkan kegagalan ramalan Marx terhadap kehancuran kapitalisme Dahrendorf mengkonsep ulang tentang dasar pembentukan kelas. Terdapat dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi kepemilikan sarana produksi yang mendasari perbedaan kelas menurut Marx. Menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas.

Terjadi dikotomi antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Dalam artian, sebagian orang turut serta dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok, sebagian yang lain tidak; sebagian orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak. Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan tajam di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dalam tingkat dominasi tersebut dapat dan selalu sangat besar.

Akan tetapi, pada dasarnya terdapat dua sistem kelas sosial: mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam kekuasaan. Oleh karena itu, perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan (authority) daripada kepemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern pemilik sarana produksi tidak sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian atas sarana tersebut.

Gagasan inti dari Dahrendorf adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi ada dalam posisi. Dengan demikian, sentral teori ini adalah wewenang/kekuasaan dan posisi. Dahrendorf menegaskan peranan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya

Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai sebuah lembaga tentunya pesantren memiliki berbagai peranan struktur yang harus dimainkan, meskipun puncak otoritas tertinggi berada di tangan kiai.

Berbagai peranan struktur dan posisi ini perlu mendapat perhatian untuk menambah analisis yang lebih memadai. Meskipun masyarakat pesantren terbagi dalam dua katagori, yakni kiai dan santri, namun dalam masyarakat santri setiap individu memiliki peranan sesuai dengan posisi mereka.

II.3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan menurut Muhadjir Darwin (1995) perlu diimplementasikan agar memberikan akibat tertentu pada masyarakat sasaran, dalam konteks penelitian ini kebijakan pesantren dalam menolak berdirinya Hypermart atau kaum kapitalis tetap pada posisinya agar kekuatan sosial, kultur dan keagamaan masih mengiringi geliat perkembangan pesantren. Proses ini dikenal dengan proses implementasi kebijakan. Dalam proses ini implementornya adalah pemangku kebijakan Pondok Pesantren Asri Talangsari, masyarakat setempat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam proses implementasi ini berlangsung upaya-upaya pendaya gunaan risorsis (sumber daya), baik sumber daya manusia maupun sumber dana, diperlukan intrepretasi kebijakan, manajemen program dan penyediaan layanan kepada sasaran kebijakan. Proses ini menghasilkan program, proyek dan langkah-langkah nyata dari aparat pelaksana. Tindakan-tindakan nyata inilah yang kemudian menghasilkan dampak tertentu bagi masyarakat termasuk bagi pelaksananya sendiri.

Implementasi kebijakan dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sebagaimana yang diharapkan, namun ada juga dampak negatifnya yang semula tidak diperhitungkan. Implementasi kebijakan yang dilakukan secara tidak efektif mengakibatkan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat menjadi tidak signifikan, dengan kata lain gagal.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Samudra Wibowo (1994) memberikan konsepsi bahwa implementasi kebijakan dapat juga berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya ada dan terjadi, sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara.

Implementasi menurut Jones dalam Winarno (2004), diartikan sebagai "*getting the job done*" and *doing it*". Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sangat sederhana. Tetapi dengan kesederhanaan rumusan yang demikian ini, tidak berarti implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi

pelaksanaannya menurut Jones, menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi yang mana dalam hal ini sering disebut *resources*. Karenanya lebih lanjut, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “ A Process of getting additional resources so as to figure out what is to be done” dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut diatas, tidak kurang dari suatu tahapan dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. *Pertama*, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. *Kedua*, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan itu.

Donald s. Van Mater dan Carl E. Van Horn dalam Winarno (2005) menguraikan batasan implementasi sebagai:

“policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions into operational term, as well as continuing effort to achieve the large and small changes mandated by policy decisions” Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan yang baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan pengertian, bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Disamping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau

program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi.

Model implementasi kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Disamping itu model implementasi kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. (William N. Dunn,2000,233)

Model-model implementasi kebijakan juga dapat memainkan peran kreatif dan kritis didalam analisis kebijakan dengan mendorong para analis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri untuk menentang ide-ide konvensional maupun metode-metode analisis penggunaan model-model implementasi kebijakan bukanlah masalah pilihan, karena setiap orang menggunakan beberapa model. (William N. Dunn,2000,233)

Jay Forrester dalam William N. Dunn,2000, mengatakan :

”setiap orang menggunakan model secara konstan. Setiap orang dalam kehidupan pribadinya dan bisnisnya secara naluriah menggunakan model-model untuk membuat keputusan. Citra mental tentang dunia di sekeliling anda yang anda bawa kedalam pikiran adalah model. Seseorang tidak mempunyai kota atau pemerintah atau negara di dalam kepalanya. Dia hanya mempunyai konsep yang terseleksi dan hubungan yang digunakan untuk menampilkan sistem nyata. Citra mental merupakan model. Semua keputusan kita ambil atas dasar model. Persoalannya bukanlah menggunakan atau mengabaikan model. Persoalannya hanyalah memilih diantara banyak alternatif.

Dengan menyederhanaan situasi masalah, model tak terelakkan menyumbang distorsi selektif atas realitas. Model sendiri tidak dapat memberitahu kita bagaimana membedakan pertanyaan-pertanyaan yang esensial dari yang tidak esensial; juga tidak dapat menjelaskan, memprediksi, mengevaluasi dan bukan merupakan bagian dari model itu. Sementara itu model dapat membantu kita untuk melakukan tugas-tugas analitis, kata kuncinya ada pada ”kita”, untuk itu kita dan bukan model yang menyediakan asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menginterpretasikan gambaran realitas yang diterapkan oleh suatu model. Dan model diciptakan untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik. (William N. Dunn,2000,234)

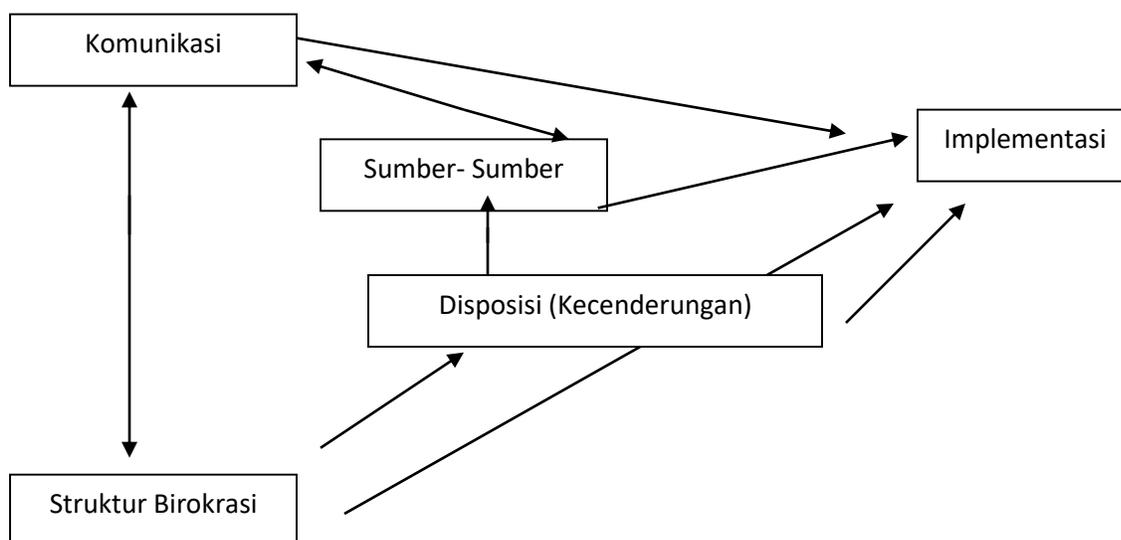
Dalam studi kebijakan Negara, terdapat banyak model implementasi kebijakan yang antara lain dikemukakan oleh, Smit, Sintesis Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn dan George Edwards III.

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan model George Edwards III, dengan pertimbangan model ini dapat menjawab dua buah pertanyaan penting yakni, prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Model ini berusaha menjawabnya dengan membicarakan empat faktor krusial dalam implementasi Kebijakan peno;akan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren Asri Talangsari Jember. Empat faktor krusial yang di maksud Edwards antara lain; komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Disamping itu model Edwards lebih mudah memahami realitas dan dapat menjawab variabel external dibanding model lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penelitian ini digunakan teori George Edwards III , yang mengemukakan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*. Keempat faktor itu akan dijelaskan sebagai berikut ini.

Model Implemetasi George Edwards III



Sumber: Budi Winarno (2004)

Faktor Komunikasi

Secara umum Edwards dalam Winarno 2004 membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi, yakni, transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementors*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selaian itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan.

a. Transmisi.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pemangku kebijakan dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.

Ketiga, kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi yang sebenarnya.

b. Kejelasan.

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.

Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Disisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana akan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, bila hal ini terjadi maka, akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Faktor Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin dapat diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi;

a. Staf.

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi akan berhasil. Namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaharuan.

Kurangnya keterampilan-keterampilan pengelola merupakan masalah besar yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan profesional. Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-administrator yang kompeten, karena pada umumnya gaji, pretise dan jaminan kerja mereka yang rendah. Persoalan yang lain berangkat dari pemrakarsa program kebijakan dan pembiayaan program-program kebijakan. Suatu program kebijakan seringkali diprakarsai oleh badan-badan legislatif dan pembiayaannya diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator kebijakan seringkali tidak menerima dana yang memadai untuk membayar jumlah dan tipe personil yang dibutuhkan guna melaksanakan kebijakan tersebut. Namun demikian, dana atau uang tidak selalu merupakan jawaban terhadap kesulitan yang mungkin timbul. Dalam kenyataannya, dana yang besar tidak selalu mudah mendapatkan personil yang terampil. Hal ini terjadi karena pemerintah mengatur persoalan-persoalan teknis dengan sangat tinggi.

b. Informasi.

Dalam hal ini, informasi mempunyai dua bentuk yaitu; 1) informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. 2) data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan beberapa kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung diantaranya, pertama, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi tepat pada waktunya, kedua,

ketidakefisienan. Kebijakan yang tidak dapat menyebabkan unit-unit pemerintah lain atau organisasi-organisasi dalam sektor swasta membeli perlengkapan, mengisi formulir atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

- c. Wewenang. Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang-barang dan jasa atau memungut pajak. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang di atas kertas, seringkali salah dimengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang cukup esensial. Wewenang di atas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar, namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

Lindblom dalam Winarno (2004) menyatakan bahwa:

”kewenangan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya kalau kita mengenal dua jalur dimana berbagai orang menggunakan berbagai metode kontrol. Jalur pertama, setiap kali bila seseorang ingin menggunakan berbagai metode kontrol, ia menerapkan berbagai metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang dikontrolnya. Jalur kedua, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja metode-metode itu untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya”.

Lindblom mengemukakan ciri-ciri kewenangan, yakni; kewenangan selalu bersifat khusus, kewenangan baik sukarela maupun paksaan merupakan konsesi dari mereka yang bersedia tunduk, kewenangan itu rapuh, kewenangan diakui karena berbagai sebab. Sedangkan sebab-sebab kewenangan terdiri dari; 1) sebagian orang beranggapan bahwa mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. 2) kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, teror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya.

- d. Fasilitas-fasilitas.

Yang merupakan fasilitas fisik diantaranya, sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Faktor Disposisi (kecenderungan)

Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

a. Dampak disposisi.

Banyak kebijakan masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. (Edwards dalam Winarno 2004)

Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang yang tidak mereka setuju, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus untuk menghambat implementasi.

b. Pengangkatan Birokrat.

Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin mereka? Hal ini terjadi karena pengangkatan personil lebih mengarah pada pertimbangan-pertimbangan politik dari pada menduduki suatu jabatan yang mempunyai

kapasitas tertentu. Keuntungan yang didapat dalam hal ini mungkin hanya menyenangkan pendukung-pendukung politik, tetapi mereka tidak akan memberikan landasan bagi terciptanya administrasi yang sehat. Dengan perkataan lain bahwa pertimbangan-pertimbangan politik dalam pengangkatan pejabat tinggi hanya akan menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Terlebih bila pengangkatan pejabat tinggi tersebut semata-mata untuk menampung berbagai kelompok yang ada di masyarakat, maka besar kemungkinan akan menghancurkan kebijakan itu sendiri.

c. Beberapa Insentif

Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar.

Menurut Edwards dalam Winarno 2004:

” salah satu tehnik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif-insentif”

Dikarenakan pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri-sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para pembuat kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya-biaya atau keuntungan-keuntungan tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi organisasi atau kebijakan substantif.

Apabila implementor kebijakan Bupati tentang penutupan tempat pelayanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi di Kabupaten Jember memiliki disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (*police maker*).

Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk mengimplemetasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisiennya struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Menurut Edwards III dalam Winarno 2004, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni;

a. Pengaruh Struktur Birokrasi bagi Implementasi (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Disamping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi dapat mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi. 1). Tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. 2). Pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan

besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Islamy (1001:9-10), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Apakah strategi atau pendekatan implementasi telah teridentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
- b. Apakah unit pelaksana telah disiapkan? Dalam hal ini adalah Dinas-dinas yang masuk dalam Tim Penanganan Pekerja Seks Komersial (Dinsos, Satpol PP, Bakesbang, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) dan organisasi masyarakat lainnya).
- c. Apakah aktor-aktor utama (*poice subsystems*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut? Apakah prinsip "*delivery mix*" (pencampuran) telah dilaksanakan? Hal ini berkaitan dengan pelaksana kebijakan mulai dari Muspida, Sekretaris Daerah sampai unsur-unsur organisasi masyarakat.
- d. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas dan difahami oleh pelaksana kebijakan? Hal ini berkaitan dengan kejelasan petunjuk teknis dan pelaksanaan Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart.
- e. Apakah koordinasi pelaksana telah dilakukan dengan baik? Hal ini berkaitan dengan koordinasi antar pelaksana Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember
- f. Bagaimana, kapan dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan? Hal ini berkaitan dengan *timing* dan penetapan penyaluran dana untuk memimplementasikan kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember
- g. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan? Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pelaksana Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember.
- h. Apakah pelaksana kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan? Hal ini berkaitan dengan kesesuaian tujuan dan sasaran Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember.

- i. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksana kebijakan telah ada, jelas dan diterapkan dengan baik? Hal ini berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember
- j. Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial? Hal ini berkaitan dengan kinerja pelaksana Kebijakan penolakan berdirinya Hypermart di sekitar Pondok Pesantren ASRI talangsari Jember.

Kriteria-kriteria diatas dalam penelitian Kebijakan penolakan berdirinya *Hypermarket* di sekitar Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember, yang dilakukan oleh peneliti dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan penolakan berdirinya *Hypermarket* (Giant) di sekitar Pondok Pesantren Ashri talangsari Jember. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa kriteria diatas mencakup adanya koalisi seluruh aktor kebijakan yang dalam penelitian ini disebut implementor.

Adapun koalisi implementor dalam implementasi suatu kebijakan sangatlah dibutuhkan, maka koalisi implementor-implementor dalam konteks ini adalah suatu persatuan atau kesatuan dari orang atau dinas atau badan atau organisasi yang berperan sebagai pelaku utama dalam implementasi suatu kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Paradigma Penelitian

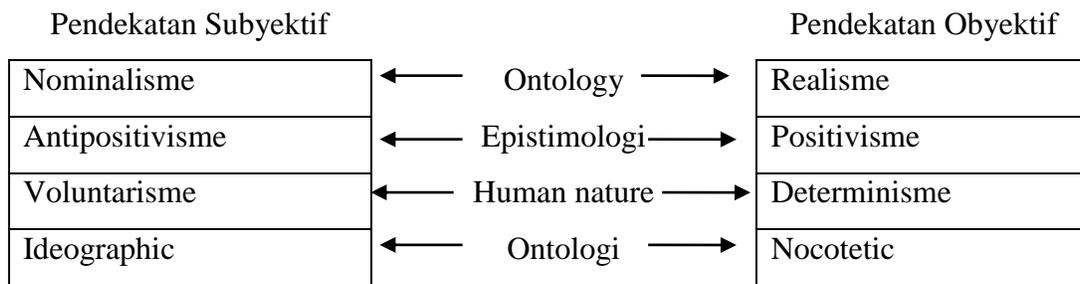
Catton dan Dunlap (1978) menemukan dua tradisi utama dalam sosiologi kontemporer dalam melihat realitas sosial, yaitu realisme dan konstruktivisme. Tradisi yang bernaung di bawah tradisi realisme adalah: *pertama*, tradisi Durkheim sebagai pelopor aliran realisme, beliau berargumentasi bahwa fakta sosial hanya dapat diterangkan jika dihubungkan dengan fakta sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa penjelasan sosiologi tentang penyebab selalu yang bersifat sosial, sebagai lawan kasus dalam psikologis, biologi dan penjelasan fisik. Realitas sosial di sini dilihat sebagai suatu fakta nyata yang berada di luar diri manusia, sehingga hal yang bersifat bukan situasi fisik (non fakta) bukanlah kajian sosiologi. Tradisi *kedua* adalah warisan Weber yang dielaborasi oleh Mead, Cooley dan Thomas. Menurut mereka, semua manusia dan kelompoknya bereaksi terhadap makna yang mereka hubungkan dengan berbagai kondisi-kondisi lingkungan, dan bertindak menurut persepsi mereka terhadap lingkungan mereka. Oleh karena itu penting memahami tatacara orang menggambarkan situasi mereka dalam menjelaskan tindakannya, persepsi dan definisi mereka, yang dipengaruhi oleh para aktor di sekitarnya dan bukan oleh karakteristik situasi fisik. Penekanan ini oleh para aktor disiratkan bahwa sifat fisik menjadi relevan hanya seperti dirasa dan digambarkan.

Berlawanan dengan realisme, perspektif konstruktivisme menekankan bahwa ada cara berbeda dalam konstruksi tentang dunia sosial. Dunia sosial tidaklah secara objektif diperoleh tetapi dibuat secara simbolis melalui kultur. Apa yang dilihat sebagai suatu objek tidak lain kecuali suatu yang secara sosial digambarkan. Sebab kondisi riil secara objektif tidak pernah dengan sendirinya menghasilkan kesadaran dari suatu fenomena sosial. Fokus sosiologi harus sebagai proses sosial yang membuat situasi atau suatu peristiwa tampak sebagai masalah sosial. Permasalahan sosial tidak *materialize* dengan sendirinya tetapi harus dibangun oleh individu atau organisasi yang menggambarkan sebagai suatu situasi yang mendesak untuk berbuat sesuatu. Pendekatan Collins (1981) dalam agenda sosiologi ilmu pengetahuan, di mana semua statemen teori harus diteliti seolah-olah tidak punya acuan terhadap dunia fisik.

Constructivism (konstruktivisme) menekankan bahwa apa yang kita pahami tentang realitas tidak hanya tumbuh dari kenyataan sendiri, karena pengetahuan kita, baik yang berhubungan dengan

alam atau dunia social, tidak berasal dari suatu pengenalan netral dan sederhana tentang kenyataan, akan tetapi lebih merupakan konstruksi yang dibangun dan erat kaitannya dengan kekuasaan.

Pengaruh dimensi filosofis terhadap ilmu sosial, oleh Burrell (1985) dibagi pada dua dimensi pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Dua dimensi ini diperdebatkan dalam empat level dimensi filosofis (ontologi, epistemologi, hakikat manusia dan metodologi) yang terlihat pada gambar 3.1. berikut :



Gambar 3.1 : Skema Hakikat Asumsi Ilmu Sosial Burrell

Pada dimensi pendekatan subjektif, secara ontologi melahirkan pendekatan subjektif nominalisme yang memandang dunia sosial dalam pengamatan individu. Dunia riil tidak lebih hanya sekedar nama, konsep dan simbol yang digunakan untuk melihat realitas struktur. Sedangkan pendekatan objektif, realisme memandang bahwa realitas dapat dilihat dari luar diri individu berupa realitas empirik. Secara epistemologi, melahirkan pendekatan subjektif anti positivisme, yang menyatakan bahwa realitas sosial hanya dapat dipahami dari pandangan individu yang langsung terhadap objek yang dikaji. Oleh karena itu, seorang peneliti harus larut dalam kehidupan yang diteliti. Sementara pendekatan objektif positivistik merupakan pendekatan yang berkembang dalam ilmu alam dengan pendekatan empirik berupa riset eksperimen dan dengan instrumen khusus dan membatasi jarak antara peneliti dan yang diteliti.

Dalam memandang hakikat manusia, akan melahirkan pendekatan subjektif voluntarisme dan objektif determinisme. Subjektif voluntarisme memandang individu memiliki kebebasan bertindak dan mampu membentuk lingkungannya dengan subjektif determinan justru menganggap bahwa individu itu dalam aktifitasnya dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Secara metodologis, pada sisi pendekatan subjektif melahirkan ideografik yang mengarah pada

pendekatan yang menekankan pada aspek historis, pada sisi lain ada pendekatan objektif nomotetik dengan pendekatan ilmu alam yang cenderung menggunakan teknik uji hipotesis (Burrell, 1985).

Guba (1995), berangkat dari tiga landasan filosofis (ontologi, epistemologi dan metodologi) memetakan empat paradigma ilmu pengetahuan yaitu: positivisme atau naturalisme, post-positivisme, teori kritik dan konstruktivisme (Guba, dalam Denzin, 1995). *Pertama*, paradigma positivisme, yang berakar dari paham ontologi realisme yang melihat realitas itu ada (*exist*) dan berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural law*). Positivisme muncul dalam sosiologi pada abad ke-19 yang dimotori oleh Auguste Comte dalam karyanya: *The Course of Positive Philosophy* (1830-1842). Kemudian dimodifikasi oleh Jhon Stuart Mill dari Inggris (1843) dalam tulisannya *A System of Logic*. Kemudian Emile Durkheim di Prancis menguraikan satu versi positivisme dalam karyanya *Rules of the Sociological Methods* (1895) yang kemudian menjadi rujukan para peneliti ilmu sosial yang beraliran positivisme.

Kedua, paradigma post-positivisme. Paradigma ini merupakan perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan, dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis aliran ini bersifat *critical realism* dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Secara epistemologis: *Modified dualist/objectivist*, hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin. Secara metodologis adalah *modified experimental/ manipulatif*. Observasi yang didewakan positivisme dipertanyakan netralitasnya, karena observasi dianggap bisa saja dipengaruhi oleh persepsi masing-masing orang. Proses dari positivisme ke post-positivisme melalui kritikan dari tiga hal yaitu : 1). Observasi sebagai unsur utama metode penelitian, 2). Hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalah pada perbedaan waktu, 3). Tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis (Salim, 2001).

Ketiga, paradigma konstruktivisme. Paradigma ini hampir merupakan untuk menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paham ini menolak positivisme dan post-positivism, dan menyatakan harus diganti dengan konstruktivisme. Secara ontologis paradigma ini beraliran relativis, dan menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk berbagai macam konstruksi

mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya sehingga tidak bisa digeneralisir.

Oleh karena itu tidak ada realitas yang bisa diungkapkan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan. Hubungan epistemologisnya berupa *transactional* dan *subjectivist* antara pengamatan dan objeknya, hubungan peneliti dan tinjauan menurut paham ini merupakan satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya (Salim, 2001). Dengan *setting natural*, metode ini lebih sering menggunakan metode kualitatif dibanding dengan metode kuantitatif. Teori muncul berdasarkan data yang ada, dan pengumpulan data dilakukan dengan proses hermeneutik dan dialektik yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi suatu proses sosial (Denzin dan YS Lincoln, 1995, dan Salim, 2001).

Keempat, teori kritik (*evaluatif*). Aliran ini memang belum bisa dikatakan sebagai paradigma sepenuhnya, akan tetapi lebih dekat untuk dikatakan *ideologically oriented inquiry*: suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Paham ontologisnya *adalah historis realism*, paham ini sama dengan post-positivisme yang menilai objek atau realitas secara kritis yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia karena merupakan realitas sejarah harus dipahami secara mendalam. Makanya secara metodologis memilih *dialogic and dialectical*, paham ini menganjurkan teknik dialog dengan transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki (Salim, 2001).

Secara epistemologis: *transactional* dan *objektivist*, hubungan antara pengamat dan realitas sosial yang diteliti tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu aliran ini menekankan aspek subjektivitas dalam menemukan sebuah ilmu pengetahuan, karena nilai-nilai yang dianut subjek (peneliti) ikut campur dalam menentukan kebenaran.

III.2. Pilihan Paradigma

Penelitian ini secara paradigmatik memposisikan diri pada paradigma konstruktivisme. Pilihan atas paradigma konstruktivis di latar belakang oleh pertimbangan ontologi dan epistemologi yang dianut paradigma ini. Secara ontologi, paradigma konstruktivis adalah bersifat relativis, artinya realitas yang dipahami bersifat plural (*multiple realitas*). Realitas tidak dapat dinyatakan secara jelas dan pasti (*intangible*). Konstruksi mental didasarkan atas pengalaman yang bersifat sosial-budaya, lokal dan spesifik, sehingga konstruksi ilmu pengetahuan tidak bersifat objektif-universal. Ilmuwan akan selalu memahami realitas dari ontologi yang relatif

(perspektif, paradigma, kerangka teori) tertentu, sehingga ilmuwan tidak melihat realitas secara utuh atau tidak secara lengkap (Lubis, 2004).

Secara epistemologi, paradigma konstruktivis bersifat transaksional dan subjektif. Di mana antara peneliti dengan subjek penelitian (tineliti) saling terkait dan interaktif. Dari segi metodologi, paradigma konstruktivis, muncul dengan metodologi hermeneutik dan dialektis (partisipatif), yang menggunakan metode interpretatif (interpretatif hermeneutik) (Lubis, 2004).

Penggunaan paradigma konstruktivis, dianggap dapat memotret realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan komunitas peneliti, karena realitas yang dimaksud tidak hanya realitas objektif (realitas yang berada di luar diri orang yang diteliti), tetapi juga realitas subjektif (realitas yang berada di dalam diri tineliti) yang menyangkut kehendak dan kesadarannya. Antara kedua realitas ini memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Hardiman (2003) menjelaskan bahwa realitas yang kita temukan dalam bentuk objektif, berupa data-data, kemudian kita terus mencari penjelasannya, kaitan sebab akibatnya, sehingga ada harapan peneliti akan menembus gejala dan menemukan realitas subjektif. Namun untuk sampai ke sana peneliti harus; *pertama*, berjumpa dengan pribadi orang tersebut, bertanya dan mendapatkan jawaban; *kedua*, dengan sungguh-sungguh mau memahami (*verstehen*)⁸ realitas itu. Jika kedua langkah tersebut dilakukan, barulah dinamakan ‘mempersoalkan realitas’ atau ‘mempersoalkan kewajaran’.

Dalam upaya melakukan penyelaman terhadap realitas batin yang paling dalam, di samping menelusuri realitas lahiriah seluas-luasnya, akan ditemukan:

- a. Struktur-struktur umum yang paling luas dan niscaya akan berdiri di luar orang yang bersangkutan (tineliti) dan berkaitan dengan dirinya. Di sana akan ditemukan sejarahnya, susunan kelasnya, tuntutan kebudayaannya, dan sebagainya.
- b. Jejaring hubungan antar aktor pada aras struktur hingga pada aras individu mengharuskan penelitian ini menyelami dua dunia secara bersamaan yaitu dunia objektif empirik dan dunia subjektif sekaligus, sehingga paradigma konstruktivis menjadi dianggap paling tepat untuk membongkar realitas yang terdalam.
- c. Menemukan struktur-struktur subjektif paling dalam yang berkaitan dengan kesadaran tineliti. Peneliti mungkin akan memperoleh persepsi-persepsi cara berfikir, sikap-sikap, disposisi, cita-cita dan seterusnya. Secara luas tidak hanya tineliti yang dapat dipahami tetapi masyarakatnya juga dapat dipahami.

III.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran tentang *Kebijakan Pesantren dalam Menolak Berdirinya Hypermaket (Giant) di Pondok Ashri Talangsari Kabupaten Jember*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis. Dikatakan fenomenologis karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, selain itu karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil dilapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Penelitian dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti (Moleong, 2005:17)

III.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu: teknik observasi berperan-serta (*participant-observation*), dan wawancara (*interview*). Sementara data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

Penggunaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*), dilakukan untuk menjangkau informasi terkait dengan persepsi dan pemaknaan implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang dilakukan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persoalan tentang berbagai macam factor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* (Debus dan Novelli, 1996).
- b. Dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data sekunder, berupa dokumen-dokumen tentang perjalanan sejarah Pondok Pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember yang dapat diperoleh dari pengurus Pondok Pesantren Ashri Talangari Kabupaten Jember.

III.5. Sumber Data

Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

- a. Aktor yang berperan langsung atau tidak langsung dalam Pondok Pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember. Aktor yang dimaksud adalah : orang yang terlibat dalam pengurus Pondok Pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang dimaksud adalah: para pengurus baik kyi maupun staf yang ada di Pondok Pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember.
- b. Masyarakat yang mendukung berdirinya *hypermarket* maupun masyarakat yang menolak keberadaan *hypermarket*. Sumber data jenis ini adalah orang sekitar pondok pesantren Ashri yang dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Cara ini dilakukan dengan lebih dahulu mencari sumber data kunci dari *masyarakat sekitar* melalui wawancara, yang kemudian dikembangkan di lapangan dengan teknik *snowball sampling*. Pencarian data dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh, artinya informasi yang diperoleh sudah mengalami pengulangan-pengulangan dan perolehan data relatif mengalami kesamaan dengan informasi-informasi sebelumnya.

III.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai data untuk membangun teori substantif dari data yang tersedia (Marshall dan Rossman, 1989). Hal ini sejalan dengan Patton (1990), dan Marvasti (2004), yang menjelaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisirnya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Selanjutnya, dalam upaya meyakini data dan hasil penelitian untuk mencapai sebuah kebenaran yang dapat dipercaya, sekalipun derajat kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan secara pasti (masalah validitas internal), namun peneliti berusaha semampunya berusaha meraih tingkat kebenaran dengan menguji keabsahan data melalui cara-cara : 1) melakukan triangulasi metoda; 2). triangulasi sumber; 3) triangulasi teori. (Moleong, 1995 dan Lincoln dan Guba, 1985 dalam Sitorus, 1999).

III.7. Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Lokasi ini menjadi pilihan dengan pertimbangan bahwa di tempat inilah ditemukan konflik yang menolak keberadaan *hypermarket*, dengan asumsi: 1) pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Syif) telah melakukan aksi protes dengan mendatangi pendopo Kabupaten yang di ikuti oleh masyarakat setempat 2) pada awalnya banyak pihak yang mendukung kebijakan penolakan tersebut, namun ditengah perjalanan sebaliknya.

III.8. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Ashri Talangsari dan aktor yang terlibat di dalamnya, dengan subjek penelitian individu. Asumsi yang diyakini adalah bahwa lembaga bergerak diwakili oleh para aktornya baik secara kelompok maupun individu, dengan mengikuti terminologi Weber (*methodological individualism*) (Weber, 1964; Ritzer, 1992 dan ; Nugroho, 2001). Individu dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini dengan pertimbangan, yaitu: *Pertama*, sebagai konsekuensi atas pilihan paradigma yang telah diletakkan dalam penelitian ini, yang melihat realitas sosial atau gejala sosial itu ada pada individu atau *internalized* dalam individu, sehingga satuan analisisnya adalah tingkah laku individu dan kolektivitas hanya sebagai hasil teratur dari perbuatan-perbuatan individu (Veerger, 1993).

Kedua, realitas sosial yang dikonstruksikan oleh individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan saling berbagi makna, dan keberadaan realitas sosial tersebut tidak dapat dipisahkan dari individu. Individu-individu merupakan realitas kongkrit dan objektif. Masyarakat hanya merupakan nama yang merujuk pada asosiasi di antara mereka. Jadi tindakan individu merupakan sumber informasi utama dalam rangka memahami fenomena sosial (Nugroho, 2001). *Ketiga*, para aktor yang ditemukan di lapangan merupakan individu-individu yang berada dalam suatu jaringan sosial personal tertentu, yang memiliki pilihan-pilihan, dan landasan etika tertentu.

III.9. Pengalaman Lapang.

Menggunakan satu paradigma metodologi dalam meneliti, ternyata tidak selamanya akan menghasilkan analisis yang tajam dan komprehensif terhadap satu persoalan. Meneliti implemtasi kebijakan pedantren dengan menggunakan teori implemtasi kebijakan dari William

Dunt yang dipadu dengan teori pesantren. Hal ini dikarenakan dalam upaya menemukan persoalan jalannya implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam menolak keberadaan hypermarket hanya dapat dengan berfikir dialektis antara fenomena objektif dan subjektif. Misalnya mengamati pemahaman tentang berbagai factor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penolakan tersebut dengan tidak bisa hanya mengamati bagaimana kebijakan itu dimaknai, namun harus melintasi proses bagaimana pemaknaan itu terbangun, dipengaruhi oleh logika apa dan siapa serta bagaimana kemudian implemtasi kebijakan penolakan berdsirinya *hypermarket* dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti sebagai salah seorang warga di salah satu wilayah di mana penelitian ini dilakukan, menemukan persoalan dalam pemburuan data. Sebagai penelitian yang dikenal oleh peneliti, mengalami kesulitan mendapatkan data, dan mengarahkan wawancara secara terfokus.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

IV.1 Gambaran Objek Penelitian

Sejarah Pondok Pesantren ASHRI Jember

Salah satu pesantren di Jember yang sudah lama menghasilkan produk generasi agamais adalah pondok pesantren ASHRI yang didirikan oleh Kyai Haji Muhammad Shiddiq. Konon, setelah pengembaraan mencari ilmunya, Kyai Shiddiq mendirikan pesantren sebagai pengabdian ilmunya di masyarakat, mula-mula di Lasem. Kemudian sekitar tahun 1884, beliau dalam usia 30 tahun hijrah ke Jember dan mendirikan pesantren dikampung Gebang Jember.

Kemudian pada tahun 1918, saat berusia 64 tahun pindah kekampung Talangsari Jember dan mendirikan pesantren yang kemudian sekarang dikenal sebagai Pesantren Ash-Shiddiqi Putra (PPI ASHTRA) di jalan KH Shiddiq 201 Jember yang diasuh oleh Gus H Firjaun bin KH Achmad Shiddiq. Pesantren di Gebang kemudian dilanjutkan oleh putranya (KH Machmud) dan kemudian dipindah ke kampung Tegal Boto yang sekarang dikenal sebagai Pesantren Al-Jauhar yang diasuh oleh (alm) Prof. DR. KH Sahilun A. Nasir M.PdI.

Tahun 1931 pondok pesantren Islam Ash-Shiddiq putri didirikan yang berlokasi di kompleks peninggalan almarhum KH. Muhammad Siddiq. Jumlah santri putrid saat itu masih 12 orang. Selanjutnya tahun 1949 KH. Abdul Halim Shiddiq (putra KH. M. Siddiq) selaku perintis ponpes putri ini, membangun penampungan bagi santri yang semakin banyak jumlahnya. Tahun 1957, KH. Abdul Halim secara swadaya membeli sebidang tanah di lokasi bagian selatan yang sekarang menjadi kompleks PPI Ashri. (Ponsok Pesantren Islam Ash Shiddiq Putri). Saat ini, Ponpes Ashri, berada di Jl KH Achmad Siddiq no 30 Jember dengan kode pos 68131, dan telpon: 0331-486442.

Kelebihan Pondok Pesantren ASHRI

- a. Pondok pesantren ashri lebih mementingkan pemahaman al-qur'an.
- b. Pondok pesantren ashri mempunyai program lulusan hafidzah setiap tahunnya untuk tingkat SD/ MI / sederajat atau MA / SMA / sederajat.
- c. Dari pendidikan sudah memenuhi syarat yaitu lulusan S1 (tenaga pengajar dari luar).

- d. Diadakannya kegiatan ekstrakurikuler
- e. Pondok Pesantren Ashri ini menjadi solusi bagi masyarakat yang khawatir kepada generasi muda yang tercemar oleh pergaulan bebas.

Susunan organisasi

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

- a. Majelis Pengasuh; terdiri atas segenap ahli waris KH. Abdul Halim Siddiq. Majelis pengasuh bersama murabbi menetapkan arah dan kebijaksanaan pondok pesantren. Majelis ini merupakan Collegia yang disalurkan melalui musyawarah majelis pengasuh tanpa memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Anggota majelis pengasuh dapat menerima tugas khusus sebagai pengasuh harian.
- b. Murabbi; adalah pimpinan tertinggi pondok pesantren yang dipilih dan diangkat oleh majelis pengasuh. Murabbi mengangkat dan memberhentikan serta menerima pertanggungjawaban pengasuh harian, lembaga-lembaga dan bagian-bagian. Murabbi juga mewakili pondok pesantren dalam urusan keluar Pengasuh harian; pengasuh harian adalah pelaksana harian dalam memimpin pengelolaan pondok pesantren. Pengasuh harian ini dibantu oleh Majelis Ma'had, majelis Madrasah dan Majelis Santri. Pengasuh harian menangani masalah kesekretariatan dan pengabdian masyarakat.
- c. Majelis Ma'had; Majelis ini mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengarahkan segala bentuk kegiatan pesantren yang bersifat Ubudiyah dan pengajian. Majelis ini mempunyai dua bagian Ubudiyah yang mengarahkan pendidikan guna menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk beribadah dengan istiqomah, tekun dan khusyu', dan bagian pengajian yang menangani program pendidikan pengajian kitab-kitab agama.
- d. Majelis Madrasah; Majelis ini mengkoordinir pendidikan dan pengajaran yang meliputi madrasah tingkat Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Madrasah-madrasah ini merupakan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementria Agama. Majelis Madrasah bertanggungjawab kepada pengasuh harian PPI Ashri.
- e. Bagian perbekalan dan perbendaharaan; bagian ini bertugas dan bertanggungjawab atas segala kebutuhan perlengkapan dan prasarana pondok baik yang bersifat rutin, rehabilitasi maupun pengadaan sarana fisik. Bagian ini mempunyai empat seksi, yaitu seksi usaha, seksi bangunan, seksi perawatan, dan seksi santutan yang kesemuanya betada di bawah murabbi dan bertanggungjawab kepada murabbi.

- f. Majelis Santri; Majelis ini merupakan organisasi intern santri sebagai wadah yang menampung segala aspirasi para santri. Majelis ini dibentuk berdasarkan musyawarah para santri secara demokratis dengan bimbingan dan pengarahan pengasuh harian. Adapun tugas majelis santri adalah mengkoordinir, menyelenggarakan dan meningkatkan segala kegiatan santri dibidang kegairahan belajar, bakat, kreasi, dan keamanan asrama serta persiapan praktis dalam bermasyarakat.
- g. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); merupakan organisasi intern siswi madrasah sebagai penunjang program maderasah. Organisasi ini dibentuk oleh musyawarah para siswi madrasah dengan bimbingan dan pengarahan majelis madrasah. Organisasi ini bertugas mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler dengan bimbingan staf majelis madrasah.

IV.2 PENYAJIAN DATA

IV.2.1 Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri Terhadap Penolakan Berdirinya *Hypermarket (Giant)* di Talangsari

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang tersebar di Indonesia. Dimana pondok pesantren lahir ditengah-tengah masyarakat. Setiap pondok pesantren memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana tipe pemimpin dan metode seperti apa yang diterapkan dalam pembelajarannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit pesantren yang mencoba menyesuaikan dan bersedia menerima akan suatu perubahan, namun tidak sedikit pula pesantren yang memiliki sikap menutup diri dari segala perubahan. Upaya perubahan maupun pembaharuan apapun yang ditawarkan pesantren tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh kiainya Penutupan diri pesantren akan sebuah perubahan dan pengaruh perkembangan zaman, itu berdasarkan kecenderungan pesantren dalam mempertahankan apa yang telah menjadi keyakinan.

Dengan keyakinan inilah, gelombang penolakan atas pembangunan *hypermarket* di Jalan KH Shiddiq lingkungan Telengsari terjadi. Pengasuh Ponpes Ash Shiddiqi Putri (ASHRI), KH Syaiful Rizal, yang akrab disapa Gus Syaif, sangat menolak dengan berdirinya *hypermarket* tersebut.

Penolakan keras yang dilakukan Gus Syaif terhadap berdirinya *hypermarket* (Giant), berdasarkan pertimbangan, ketakutan akan terjadinya perubahan gaya hidup terhadap para santri yang berada sepanjang jalan KH. Achmad Siddiq, khususnya santri yang berada di Ponpes Ashri.

Pesantren adalah lembaga yang mentraining kehidupan sederhana. Ditakutkan para santri akan konsumtif dan mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak sederhana. Padahal pesantren itu, lebih mendidik kepada santri dengan pola-pola yang agamis. (Gus Syaif, *wawancara*, Jember, 6 Nopember 2013)

Pada dasarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tidak memiliki tujuan yang formal tertuang dalam teks tertulis. Namun hal itu bukan berarti pesantren tidak memiliki tujuan, setiap lembaga pendidikan yang melakukan suatu proses pendidikan, sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengasuh ponpes Ashri Jember, berupaya untuk melestarikan kehidupan sederhana bagi para santrinya. Budaya konsumtif berada jauh dari kehidupan pesantren. Tetapi, nampaknya Selain itu, penolakan yang Gus Syaif lakukan, tidak berdasarkan kepentingan pesantren saja. Menurutny dari segi perekonomian, pemaksaan untuk berdirinya *Hypermarket* di jalan KH. Achmad Siddiq Talangsari, juga akan membawah dampak negatif untuk perekonomian sekitar.

Apalagi, terang saja, *hypermarket* itu sudah tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia. Adakah nilai-nilai ekonominya? Bukan tidak mau maju, tapi, nilai-nilai ekonomi yang dibangun oleh Indonesia juga tidak ada. Apalagi ada penelitian-penelitian yang menyatakan tentang berdirinya minimarket telah mematikan usaha kecil di sekitar minimarket tersebut. Padahal sebenarnya fatal ini, jika tetap memaksakan berdirinya Giant di jln KH Achmad Siddiq. Memang kalau berbicara ekonomi, ada yang diuntungkan. Tapi hanya segelintir. Jangan hanya terpancing dengan berdirinya Giant akan menyerap tenaga kerja (Gus Syaif, *wawancara*, Jember, 6 Nopember 2013)

Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren.

Oleh karena itu, Gus Syaif selaku pemangku kebijakan kyai, memiliki kebijakan untuk secara tegas menolak pendirian *hypermarket*. Selain penolakan, dalam laman resmi, Gus Syaif juga berancang-ancang akan menggugat atas izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Jember MZA Djalal untuk pendirian Giant,

“Saya akan menyewa penasihat hukum. Terbitnya Izin Prinsip ini akan kami PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)-kan. Ini kami masih mengumpulkan materi, terkait hal tersebut,” tegas Gus Syaif (Gus Syaif, *wawancara*, Jember, 6 Nopember 2013).

IV.2.2. Faktor Pendukung Impelementasi Kebijakan Pondok Pessantren Ashri dalam Menolak berdirinya *hypermarket* Giant di Taalangsari

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ponpes Ashri, nampaknya memperoleh angin segar. Hal ini terbukti dengan datangnya dukungan yang berasal dari sejumlah aktivis, salah satunya Kustiono Musri.

Mengaku membawai dukungan dengan nama LSM Forum Masyarakat Tertindas, Kustiono memberikan dukungan, melihat dari perjuangan Gus Syaif yang sudah lama dalam menolak berdirinya *hypermarket*. “*Itu kan perjuangannya sudah dimulai bulan april 2013*”, ujar Kustiono.

Selain itu, dalam memberikan argumentasinya tentang pendirian Giant di Talangsari, menurut Kustiono, pemberian izin yang dikeluarkan oleh Bupati Jember sudah cacat hukum. Apalagi terkait dengan pembangunan *Hypermarket* Giant yang terus berlanjut sampai saat ini.

Ya itulah...salah satu bentuk arogansinya pemerintah. Kemarin itu, Amdallalin (Analisis Dampak Lalu Lintas), seharusnya menjadi prasyarat berdirinya *hypermarket*, tapi dinyatakan menyusul bias (Kustiono Musri, *wawancara*, Jember, 6 Nopember 2013)

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan, pasal 3 menjelaskan tentang:

Ayat 1; “Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*, harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan”.

- a. Ayat 2; “Analisa kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi: Struktur penduduk mata pencaharian dan pendidikan
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
- c. Kepadatan penduduk
- d. Pertumbuhan penduduk
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal

- g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal
- h. Keberadaan fasilitas social dan fasilitas umum yang sudah ada
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, dan
- j. Tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*”).

Kemudian dilanjutkan dalam ayat 3; “ Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i harus mempertimbangkan:

- a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau pasar tradisional dengan *Hypermarket* atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya.
- b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan pasar tradisional
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur, dan
- e. Perkembangan pemukiman baru”.

Meninjau kembali, argumentasi Kustiono memang tidak bisa dinyatakan isapan jempol semata. Karena disebutkan dalam Permendagri bahwa Kabupaten yang belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang wilayah tidak diperbolehkan memberikan izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Padahal, seperti yang diketahui bersama, bahwa RTRW Kabupaten Jember masih digodok Pansus yang dibentuk DPRD Jember. Penerbitan izin prinsip pembangunan Giant di bekas Pabrik Es Talangsari, juga menabrak Perbup tentang pengaturan pasar modern dan supermarket.

Jadi pemerintah Kabupaten Jember, memberikan izin lokasi berdirinya kepada investor itu sama saja mencidrai. Dimana bupati telah membuat PERDA yang menyatakan bahwa jarak antar pasar tradisional dengan minimarket minimal 1000m. tapi setelah kami ukur, kurang dari 1 km (Kustiono Musri, *wawancara*, Jember, 6 Nopember 2013)

Dalam rancangan Perda Kabupaten Jember tahun 2012 pasal 10 ayat 4 huruf g, menjelaskan bahwa: “radius antara *minimarket* jaringan dengan pasar tradisional minimal 2.500 m (dua setengah km)”.

IV.2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam menolak berdirinya *hypermarket* Giant di Talangsari

Dari kebijakan penolakan pendirian *hypermarket* Giant yang telah dikeluarkan, nampaknya tidak semua golongan dapat menerima keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Ponpes Ashri, khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan kyai, Gus Syaif. Pasalnya, pendirian *hypermarket* di Talangsari sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Investor juga sudah mengantongi izin yang berlaku. Sehingga, sebenarnya tidak ada masalah jika pendirian *hypermarket* di jalan KH. Achmad Siddiq tetap berlanjut.

Pihak yang setuju dengan pendirian *hyprtmarket*, adalah masyarakat yang hidup dan berdomisili di area lingkungan tersebut. Eka, perempuan yang bermata pencaharian sebagai penjual nasi, mengaku setuju sekali dengan adanya Giant di wilayahnya.

Ya kan enak mbak, ramai, disini lingkungannya maju, trus lapangan kerja banyak. Kan yang pemuda-pemuda sini enak, lulus sekolah langsung bisa melamar kerja (yang daerah sini tapi). Kan enak langsung diterima pokoknya dari lingkungan sini. Banyak loh yang sudah melamar (Eka, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013)

Memperoleh narasumber lain yang setuju dengan berdirinya Giant, laki-laki paruh baya bertempat tinggal di Talangsari yang juga menjadi waker dalam proses pembangunan *hypermarket* ini setuju dengan adanya Giant di lingkungannya.

Saya setuju ae, tapi perlu ketegasan bahwa memang yang bekerja selama ini adalah warga sendiri (warga Talangsari). Toch ini tidak dijual, hanya sistem kontrak. Jadi Giant ngontrak ke pabrik es. Pabrik sendiri masih berproduksi di belakang. Perkiraan lamanya masa yang ngontrak antara 20 tahun sampai 25 tahun (Waker, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013)

Eka juga menambahkan, menurutnya kebijakan penolakan yang dilakukan pesantren, bukan inisiatif dari masyarakat yang berdomisili di lingkungan Talangsari. Warga Talangsari sangat setuju dnegan pendirian Giant.

Yang nolak itu hanya sebagian, pondokan saja, satu orang cuma. Yah... ngak tahu saya ngak bilang ya, pokoknya kalau warga sini semuanya ya setuju. Siapa seh yang ngak mau maju. Setiap orang pengen maju (Eka, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013)

Beberapa warga Talangsari, untuk saat ini, juga sudah merasakan memperoleh lapangan kerja baru. Warga Talangsari sendiri sudah memperoleh beberapa keuntungan dengan berdirinya Giant. Waker tersebut menjelaskan, tidak perlu menunggu Giant berdiri, dalam proses pendiriannya saja, sudah dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar Talangsari.

ya. Bahkan ada belasan warga yang sudah kerja dalam pembangunan ini. Untuk selanjutnya, nanti memang sudah ada kesepakatan (hitam di atas putih). Untuk karyawan

sendiri, Kalau memang ada warga yang minat mau kerja, mereka yang akan diutamakan Kalau tidak ada perjanjian kan... yach ngak brani (Waker, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013)

Terkait Amdalalin (Analisa Dampak Lalu Lintas) yang ditakutkan akan menjadikan kawasan Talangsari penyebab terjadinya kemacetan yang parah di Kabupaten Jember, Eka berargumen,

Cuma kemarin yang bangun (proses pembangunan) ini kan yang materialan (mendatangkan bahan bangunan), truk-truk materialan itu kan yang buat macet. Menurutku kalau sudah selesai yach ngak macet mbak, kan sudah ada tukang parkirnya sendiri (Eka, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013)

Dalam kesempatan dan situasi yang berbeda, waker memberikan statement yang menurutnya adalah sebuah rahasia. Kemacetan akan terkendali, karena menurut waker, dari luas lahan yang tersedia, 40% diperuntukan untuk lahan parkir.

Ini cuma satu lantai, Sama dengan Carrefour . Ini bukan hyper atau mall. Ini Cuma supermarket. Bocoran yach..., lahan untuk parkir 40% dan untuk bangunan 60%. Dan pembangunannya diperkirakan selesai dalam waktu 3 bulan. Insyaallah, kalau tidak ada halangan, tanggal 22 desember 2013 *launching* peresmian Giant akan dilaksanakan (Waker, *wawancara*, Jember, 15 Nopember 2013).

IV.3. Analisis Data

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, bahwa tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui :

- Implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari Jember dalam menolak berdirinya *hypermarket* (Giant) di lingkungan pondok pesantren.
- Faktor-faktor yang mengambat dan mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Agar mencapai tujuan-tujuan diatas maka pada bagian ini semua fakta yang diperoleh dilapangan, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka akan dibahas atau dianalisis baik dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maupaun mendiskusikan fakta di lapangan dengan teori George C. Edwards III.

IV.3.1. Implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari Jember dalam menolak berdirinya *hypermarket* (Giant) di lingkungan pondok pesantren

Implementasi kebijakan bukan sekedar mekanisme penjabaran dari keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, akan tetapi lebih luas lagi berkaitan dengan masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Sehingga tidak salah jika implementasi dikatakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan kebijakan. Implementasi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan baik eksekutif maupun legislatif).

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sebatas tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku administratif atau birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan pesantren Ashri dalam menolak berdirinya *hypermarket* (Giant) Talangsari Jember merupakan tindakan dari pihak-pihak terkait dengan pemecahan masalah yang timbul dari fenomena sosial.

IV.3.2. Agenda Bupati Jember

Salah satu agenda Bupati Jember dalam mengikuti arus globalisasi adalah memarakan berdirinya waralaba atau toko modern atau *hypermarket* (Giant). Bupati berasumsi bahwa semakin banyak berdirinya waralaba atau *hypermarket* (Giant) maka semakin banyak menambah pemasukan kas daerah. Dan Bupati menyangkal jika keberadaan toko modern dapat memarginalkan toko kelontongan, justru toko modern dapat di jadikan tempat grosir bagi toko kelontongan, begitu ujar Bupati.

Penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) yang di lakukan oleh pemangku kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa:

- a. Keberadaan *hypermarket* (Giant) di lahan pabrik es sangat di khawatirkan akan mencemari akhalq warga lingkungan Takangsari yang sejak zaman dulu telah di kenal sebagai kawasan religious
- b. Kepadatan lalu lintas talangsari yang saat ini melampaui ambang batas, akan semakin parah oleh hadirnya pengunjung *hypermarket* (Giant)

- c. Proses sosialisasi dan permohonan penerbitan ijin *hypermarket* (Giant) Talangsari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Bangunan pabrik es yang dibangun tahun 1913 seyogyanya dilestarikan dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya
- e. *hypermarket* (Giant) itu sudah tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia. Nilai-nilai ekonomi yang dibangun oleh Indonesia juga tidak ada. Apalagi ada penelitian-penelitian yang menyatakan tentang berdirinya minimarket telah mematikan usaha kecil di sekitar minimarket tersebut.

IV.3.3. Tim Pendirian *hypermarket* (Giant)

Ada beberapa tim yang terkait dengan pendirian *hypermarket* (Giant) yang masuk ketagori tim klarifikasi diantaranya; Disperindag, Dinas Pariwisata, Bakesbang, Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Dishub, Kasat Lantas, Komisi D DPRD. Yang termasuk tim peduli warga talangsari anatar lain: pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga sekitar.

IV.3.4. Mekanisme Penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1.	24 Maret 2013	Info awal rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari: 3 Kepala dinas Pemkab Kabupaten Jember (disperindag, Pariwisata dan Bakesbang) dating menemui Pimpinan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Syaif) dan menyampaikan informasi adanya rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di lahan pabrik es Talangsari yang milik PT. Panca Wira Usaha, BUMD Pemprov Jatim
2.	03 April 2013	Pengumpulan tanda tangan warga Talangsari dilakukan secara seumbunyi sembunyi oleh pihak <i>hypermarket</i> (Giant) dengan menandatangani surat persetujuan tertulis atas berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari maka warga

		lingkungan Talangsari yang berjumlah 150 an mendapatkan imbalan Rp. 500.000 setiapn tanda tangan
3.	25 April 2013	Pemangku Kebijakan Pondok Pesantren Ashri (Gus syaif) menolak rencana tersebut dengan pertimbangan: a). Keberadaan (kegiatan konsumerisme dari supermarket) Giant dilahan pabrik es nantinya sangat menghawatirkan karena akan mencemari akhlah dan perilaku warga lingkungan Talangsari yang sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai warga atau kawasan yang religius. b). Kepadatan lalulintas Talangsari yang saat ini telah melampaui ambang batas, akan semakin parah oleh hadirnya pengunjung <i>hypermarket</i> (Giant). c). Jarak lokasi <i>hypermarket</i> (Giant) terlalu dekat (500 m) dengan lokasi pasar tradisional (pasar tanjung) yang di khawatirkan akan mengurangi omzet pedagang pasar tradisional. d). proses sosialisaidan permohonan dan penerbitan ijin <i>hypermarket</i> (Giant) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e). bangunan pabrik es yang di bangun tahun 2013 seyogyanya dilestarikan atau di gunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya. f). gus Syaef tidak menolak berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant), asal bukan di lahan pabrik es Talangsari.
4.	30 April 2013	Bangunan pabrik es di bongkar
5.	02 Mei 2013	Raker bersama di gelar pertama kali dengan aksi menolak rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant), menghasilkan; a) Gus Syaif dan tim warga peduli melakukan aksi demo penolakan rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) dikantor Desperindag dan dinas KLH Pemkab Jember. b) komisi D DPRD Jember melakukanheraing bersama Ka. Disperindag,

		<p>Ka. Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Ksat Lantas dan Dishub dengan notulen (1; semua Ka. Dinas (termasuk Bupati) menyatakan belum mengetahui adanya proses permohonan ijin rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari, 2; pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) Talangsari harus memenuhi syarat amdal atau melalui kajian akademis yang menjadi syarat dalam menertibkan ijin mendirikan bangunan (IMB), 3; Kasat Lantas menggambarkan bahwa sikon lalulintas dikawasan tersebut sudah sangat padat tidak layak, terlebih lagi jika aka nada tambahan beban dari <i>hypermarket</i> (Giant), 4; Komisi D menyatakan menolak pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari dan akan menyampaikan penolakan tersebut ke PEMPROV Jatim). c). ketua komisi D turun ke bawah ke pabrik es Talangsari dan memerintahkan Manager untuk menghentikan kegiatan pembongkaran bangunan</p>
6.	13 Mei 2013	<p>Ketua komisi D Jember melapor ke komisi C PEMPROV Jatiim dan hasil tindak lanjutnya ada;ah; a); komis C menolak rencana berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari <i>hypermarket</i> (Giant) dan mendesak Dirut PT. Panca Wira Usaha (yang membawahi pabrik es Talangsari) untuk membatalkan MOu penyewaan lahan kepada <i>hypermarket</i> (Giant) dan Dirut pada saat itu menyatakan batal. b). Komisi C akan berkoordinasi dengan DPRD Jember</p>
7.	15 Juli 2013	<p>Bupati menerbitkan surat klarifikasi lokasi rencana <i>hypermarket</i> (Giant) di lahan pabrik es Talangsari berdasarkan; a) surat permohonan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) kepada Bupati Jember tanggal 13 Maret 2013 dan di acc Bupati untuk di tindaklanjuti tanggal 16 april 2013 dan juga terdapat rekomendasi pertimbangan teknis kantor BPN</p>

		Jember tertanggal 10 Juni 2013.
8.	26 agustus 2013	Ada kegiatan pembangunan di lahan pabrik es yang berupa pembongkaran, pembersihan dan pembuatan pagar
9.	29 agustus 2013	Tim PEMPROV Jatim (utusan Gubernur) datang ke Gus Syaif untuk melakukan wawancara dalam rangka mengklarifikasi surat Gus Syaif yang di kirimkan ke Gubernur Jawa timur, dan tim tersebut berjanji akan mempertemukan semua pihak terkait dalam sebuah forum PEMPROV
10.	5 September 2013	Raker bersama kedua di gelar kembali yang mengundang adalah komis D DPRD yang ditulis dalam sebuah notulen yang berisi; a) ketua komisi D (Ayub) membuka raker bersama tepat jam 10.20 yang di tetapkan sebagai forum penampung aspirasi, informasi atau masukan. b) Hanif perwakilan dari pondok pesantren ASRHI menyampaikan maaf karena Gus Syaif tidak bisa hadir namun yang bersangkutan menugaskan teman dari FKLSM untuk mewakili Ashri. c) hafidi (anggota komisi D) interupsi untuk menunda raker karena ada pihak yang tidak hadir yaitu Gus Syaif, namun interupsi tersebut di tolak oleh ketua sidang dengan asumsi bahwa forum ini tidak untuk mengambil keputusan namun untuk menampung informasi atau masukan. d) Kustiono dari pihak pondok pesantren Ashri mengusulkan agar menghadirkan investor, agar forum tidak terkesan konflik antar warga dan pemerintah daerah. e) ketua komite dari SD Al Furqon menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah wali murid dan warga lingkungan SD Al Furqon menyatakan menolak berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) karena banyak menimbulkan dampak negative (social, ekonomi, pendidikan dan lingkungan). f) Tito dari Ka DKLH

		<p>menyampaikan bahwa telah menerbitkan HO pada tanggal 17-08-2013 karena telah memenuhi syarat (ada ijin lokasi Bupati, BPN dan persetujuan tertulis dari banyak warga sekitar. g) dari Ka PU Cipta Karya (Merwin) memberikan bukti tentang penerbitan IMB tgl 31-08-2013 karena telah memenuhi syarat. h) dinas perhubungan (Putu Budiade) mengungkapkan bahwa belum pernah ada pembahasan atau penerbitan amdal alin, padahal hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum menerbitkan izin IMB, HO dan lain nya. disamping itu amdal lalin harus di buat oleh lembaga yang memiliki sertifikasi yang berkompenten begitu lanjutnya. i) Atang Suparta dari perwakilan Polres mengatakan bahwa situasi lingkungan dan kondisi lebar jalan yang hanya 6 m yang tidak memenuhi syarat berdirinya toko modern dan mengkhawatirkan timbulnya dampak social negative jika pembangunan tetap dilanjutkan. j) salah satu anggota DPRD komisi D (Gafur) menyayangkan keangkuhan sikap bupati yang menerbitkan ijin prinsip <i>hypermarket</i> (Giant) padahal mekanismenya harus melalui tahapan amdal alin dahulu dan berharap DPRD mampu meluruskan masalah ini.</p> <p>Dalam raker tersebut telah di catat semua informasi dan masukan untuk ditindaklanjuti pada raker yang akan dating yaitu pada hari senin tanggal 9 september 2013.</p>
11.	9 septemembr 2013	<p>Raker bersama ketiga di gelar kembali yang mengahsilkan; a) gus syaif menyampaikan penolakan atas pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) dilahan pabrik es dengan alas an berdampak negative bagi pendidikan dan lalu lintas di jalan KH. Sidiq (amdal lalin belum dipenuhi), b)sekab menjelaskan</p>

		<p>bahwa ijin Bupati hanya berupa klarifikasi ijin lokasi yang masih harus dilengkapi oleh pihak <i>hypermarket</i> (Giant) dengan ijin ijin lain yang sesuai peraturan yang berlaku, c) direktur <i>hypermarket</i> (Giant) menyatakan batal membangun atau mendirikan <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari karena ada penolakan dari Gus Syaif. Selanjutnya komisi D menerbitkan berita acar pernyataan direktur <i>hypermarket</i> (Giant).</p>
12.	10 september 2013	<p>Warga Talangsari yang berubah haluan menjadi pendukung berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari mendatangi gedung DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasinya, namun tidak bertemu dengan anggota dewan karena semua anggota DPRD sedang mengadakan workshop di Batu Malang. Untuk menghilangkan rasa kecewa karena tidak bertemu dengan anggota dewan maka masyarakat menuju Radio Prosalina dan menyampaikan aspirasinya melalui acara “dobrak” radio prosalina dengan mengungkapkan bahwa; a) mayoritas warga Talangsari telah menyetujui pendirian <i>hypermarket</i> (Giant), sedangkan yang menolak hanya satu warga dan LSM yang bukan warga Talangsari, b) masyarakat pro pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) ini menganggap keberadaan <i>hypermarket</i> (Giant) akan dapat meningkatkan perekonomian lingkungan dan menyerap tenaga kerja dari warga</p>
13.	7 oktober 2013	<p>Diadakan reker bersama ke empat namun karena tidak kuorum maka di tutup dan di putus untuk di undang kembali tanggal 10 oktober 2013</p>
14.	10 oktober 2013	<p>Raker bersama ke lima di gelar kembali dengan menampung aspirasi warga yang menolak dan komisi D akan membahas</p>

		secara internal dan mengusulkan hak-hak anggota DPRD ke rapim DPRD
15.	11 oktober 2013	Wakil DPRD Jember (Ulum) mengatakan di media bahwa menolak usulan komisi D menggunakan hak-hak DPRD atas ketidakhadiran eksklusif dalam 2 kali raker dan Ulum menyarankan agar warga menggugat Bupati di pengadilan.
16.	17 oktober 2013	Polres menghimbau pembangunan <i>hypermarket</i> (Giant) di hentikan sementara dan akan menyurati Bupati untuk membentuk forum lalin
17.	19 oktober 2013	Kepala BAKESBANG menggelar pembahasan amdal lalin 10 oktober 2013 di pendopo kelurahan Jember kidul yang dipimpin kepala BAKESBANG Pemkab Jember dengan dihadiri Camat Kaliwates, lurah Jember Kidul dan warga pro <i>hypermarket</i> (Giant)
18.	22 oktober 2013	Gus Staif mendesak Ka. PU Cipta Karya mencabut IMB <i>hypermarket</i> (Giant) karena tidak sesuai dengan pernyataan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) yang akan tidak memulai pembangunan jika situsai tidak kondusif dan Ka Dinas menindaklanjuti desakan Gus Syaif dengan cara menyurati Direktur <i>hypermarket</i> (Giant)
19.	23 oktober 2013	Bupati meminta warga menolak keberadaan <i>hypermarket</i> (Giant) melalui pengadilan karena beliau telah menerbitkan ijin pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) telah sesuai ketentuan yang berlaku
20.	25 oktober 2013	Gus Syaif melaporkan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) atas kebohongan public dalam pernyataannya “menghentikan pembangunan <i>hypermarket</i> (Giant) di talangsari yang pernah di sampaikan dalam raker

IV.3.5. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan penolakan berdirinya Hypermarket

Menurut Edwards , implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain (Winarno,2004).

IV.3.5.1. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini merupakan tugas pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember.

Komunikasi dalam hal ini adalah implementasi kebijakan penolakan berdirinya Hypermarket di wilayah Pondok Pesantren Talangsari Jember. Sedangkan keseluruhan informasi tentang penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) tertuang dalam aksi demo yang di sampaikan di depan pendopo bupati pada tanggal 25 Maret 2013

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sifat informasi penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di wilayah Pondok Pesantren Talangsari Jember ini tidak mengikat tidak seluruh elemen masyarakat faham atau tau tentang penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di dekat área Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Sedangkan konsistensi informasi ini dinilai peneliti tidak konsisten, karena informasi yang diperoleh bagian Pondok Pesantren dengan masyarakat sekitar tidak sama.

Atas dasar resume informasi tentang eksistensi indikator faktor komunikasi tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa faktor komunikasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) berjalan tidak baik.

IV.3.5.2. Faktor Sumber-sumber

Sumber daya merupakan pelaksana dari implementasi, dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mendukung terhadap penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) dan yang tergabung dalam kelompok peduli warga. Yang dimaksud

informasi dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana kinerja pemangku kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari dan kelompok peduli waraga dalam melaksanakan penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant). Wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hak dari masing-masing Dinas yang tergabung dalam Tim klarifikasi untuk melaksanakan tugasnya, misalnya dinas DESPERINDAG yang menertibkan ijin mendirikan bangunan (IMB) *hypermarket* (Giant). Sedangkan fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain upaya-upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan implementasi penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari, antara lain seperti mengajukan surat ke PEMPROV Jatim dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti pasal-pasal pendirian toko modern.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan yang berkaitan masalah sumber-sumber antara lain disampaikan oleh Dinas POLRES dan Anggota Komisi D .

Dinas POLRES, yang diwakili oleh Bapak Atang Suparta, Kabag OP. Satlantas yang merupakan salah satu anggota dari Tim Kalifikasi mengatakan:

” berdasarkan Undang-undang (UU) dan peraturan perundangan (PP), Amdan lalin merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan ijin-ijin yang lain. Dan rencana pembangunan *hypermarket* (Giant) Talangsari belum memiliki amdal lalin. Disamping itu situasi lingkungan dan kondisi lebar jalan sepanjang Talangsari (KH Sidiq) hanya berukuran 6 M sehingga jelas tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah toko modern.” (25 Oktober 2013)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dinas Perhubungan yang dalam hal ini di wakili oleh Bapak Putu Budiade

“selama ini belum pernah ada pembahasan atau penerbitan amdal lalin, padahal hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum menerbitkan izin IMB, HO dan lain-lain” (25 Oktober 2013)

Komisi D DPRD yang di wakili oleh Drs. Gafur memberikan statmen sebagai berikut:

”saya sangat menyayangkan sikap bapak Bupati yang keuh-keuh terhadap proses pendirian dan penerbitan ijin *hypermarket* (Giant), saya juga sangat berharap DPRD mampu meluruskan masalah administrasi dari sang penguasa kabupaten” (1 Nopember 2013)

Di samping itu komisi D DPRD juga telah melakukan hearing bersama dengan; Ka. Disperindag, Ka. Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Kasat Lantas dan Dishub dengan notulen:

“ semua Ka. Dinas menyatakan belum mengetahui adanya proses proses permohonan izin rencana pendirian *hypermarket* (Giant) Talangsari, Kasat Lantas menggambarkan bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di kawasan KH Shidiq sudah sangat padat dan tidak layak, terlebih lagi jika akan ada tambahan beban dari kegiatan *hypermarket* (Giant) dan komisi D menyatakan menolak pendirian *hypermarket* (Giant) di Talangsari dan akan menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah Provinsi Jawa timur” (1 Nopember 2013)

Dengan hasil hearing tersebut maka ketua komisi D turun kebawah ke pabrik es Talangsari dan memerintahkan Manager untuk menghentikan kegiatan pembongkaran bangunan *hypermarket* (Giant) Talangsari.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tenaga pelaksana yang meliputi semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim klarifikasi dan peduli Warga Talangsari tergolong cukup lengkap dan kualitasnya pun cukup baik, artinya untuk menjalankan kebijakan Penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) Talangsari dipandang mampu oleh peneliti walaupun harus bekerja sama dengan instansi atau organisasi masyarakat (LSM) lain yang terkait.

Untuk melakukan implementasi kebijakan Pondok Pesantren ASRHI dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari dari masing-masing personal sudah mengetahui tugas pokok (TUPOKSI) yang disesuaikan dengan tugas dari Tim klarifikasi dan tim Peduli warga Talangsari

Sumber dana untuk implementasi kebijakan Pondok Pesantren ASRHI dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari dari Anggaran pribadi pemangku kebijakan Pondok Pesantren ASRHI Talangsari juga dari warga pendukung dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kondisi riil dilapangan (obyek penelitian), peneliti kesulitan mendapatkan data mengenai berapa jumlah kisaran sumber pendanaan hal ini disebabkan karena sistem sukarela yang ada.

Berdasarkan diskripsi indikator variabel sumber-sumber diatas. Dapatlah dikemukakan bahwa kualifikasi sumber daya secara umum tergolong kurang baik. Hanya jumlah dan kualitas sumber daya pelaksana saja yang mendukung implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari tersebut, namun jumlah dana dan kecukupan sarana dan prasarana masih kurang mendukung implementasi kebijakan.

IV.3.5.3. Faktor Disposisi atau Kecenderungan-kecenderungan

Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dalam implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari adalah komitmen dan keseriusan dari masing-masing tim yang sudah masuk dalam Tim klarifikasi dan tim peduli warga talangsari.

Melalui beberapa Dinas maka akan diketahui bagaimana komitmen dan keseriusan mereka dalam implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari.

IV.3.5.4 Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu 1) Standard Operating Procedures (SOP), dalam penelitian ini yang dimaksud SOP adalah prosedur langkah-langkah implementasi Kebijakan

Dasar Hukum Utama Peraturan Presiden No. 112 Tahun. 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan juga berdasar rancangan Perda No. 00 Tahun 2012 pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember

Struktur birokrasi yang berkarakteristik Standard Operating Procedures (SOP) cukup baik karena tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari Akan tetapi dukungan aparat pelaksana dan dinas terkait tergolong kurang baik. Fenomena yang mendorong pada penilaian tersebut terbukti sampai tahun saat ini atau saat penelitian slesai pembangunan *hypermarket* (Giant) di Talangsari sudah masuk tahap *finising* dan akan di *louncing* pada akhir bulan Desember 2013

Sedangkan karakteristik yang kedua dari struktur birokrasi yaitu Fragmentasi. Pada kenyataannya fragmentasi terjadi antar Dinas terkait yang masuk dalam Tim Kalrifikasi dan tim peduli warga Talangsari kurang mendukung implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari. Berdasarkan uraian diatas, dapatlah dikemukakan bahwa faktor struktur birokrasi ini tergolong kurang baik.

Oleh karena kebijakan pemerintah melibatkan kepentingan banyak *orang (public interst)*, maka hendaknya setiap kebijakan pemerintah daerah yang dibuat harus dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi banyak orang, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Agar supaya kebijakan pemerintah dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan (*demands*), kepentingan umum (*public interst*), dan mendapat dukungan (*support*), serta sumber-sumber (*sesources*) untuk menunjang tuntutan tersebut, maka kebijakan negara harus dibuat sebaik mungkin, dan perlu mendapat pengkajian yang cermat dan seksama, pada setiap tahapan dalam proses kebijakan negara (*public policy process*).

Dalam studi kebijakan negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat "*crucial*", pada studi administrasi dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, apabila tidak didahului dengan adanya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hasil yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga sebaliknya, walaupun adanya suatu rencana kebijakan yang baik, tetapi tidak diikuti dengan tindak lanjut yang baik, maka juga tidak akan bisa dicapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, bila menginginkan suatu kebijakan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka dituntut adanya suatu rencana yang baik dan diikuti dengan tindak lanjut dari implementasi kebijakan yang baik pula (Sanusi, A. 2003: 11).

Dari pernyataan tersebut bisa dikemukakan bahwa kenapa implelementasi tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena rencana kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah memang sudah bagus, tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan sebagai tindak lanjut pasca penutupan lokalisasi tersebut. Sehingga pada akhirnya lokalisasi beroperasi kembali.

Pada kenyataannya implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik karena dalam merumuskan kebijakan tidak diawali dengan analisis kebutuhan, atau tidak dilakukan identifikasi masalah atau kebutuhan terlebih dahulu. Padahal hal itu merupakan keharusan dalam merumuskan kebijakan publik agar kebijakan yang dirumuskan dapat sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Para ahli kebijakan publik yang mementingkan perlunya identifikasi kebijakan sebelum merumuskan kebijakan publik diantaranya, William N. Dunn (2000) yang mengemukakan, bahwa tahapan proses penyusunan kebijakan adaalah: 1) Penyusunan Agenda, 2) Formulasi Kebijakan, 3) Adopsi Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan dan 5) Penilaian Kebijakan. Irfan

Islami (1984) juga mengemukakan hal yang senada dimana tahapan kebijakan publik meliputi: 1) Perumusan Masalah, 2) penyusunan Agenda, 3) Penyusunan usulan, 4) Pelaksana Kebijakan, dan 5) Penilaian Pelaksana Kebijakan.

Dengan alasan tersebut diatas wajar saja jika implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari tidak berjalan dengan baik. Dan apabila dikaitkan dengan pendapat George Edward III (1980) sangat logis jika implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari kurang baik, sebab hanya didukung oleh faktor komunikasi, tetapi kurang didukung oleh faktor sumber-sumber, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terkait dengan permasalahan-permasalahan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Hal itu didasarkan pada fenomena bahwa banyak terjadi benturan antar pondok pesantren, masyarakat yang pro maupun kontra, juga dengan dinas terkait dan juga banyak mengandung muatan politik dalam menyelesaikan konflik penolakan tersebut.
2. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pondok pesantren Ashri Talangsari ternyata banyak faktor yang tidak mendukung implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang di lakukan oleh pondok pesantren Ashri Talangsari, dan lingkungan masyarakatpun juga kurang mendukung sehingga kualifikasinya kurang baik. Oleh karena itu wajar jika implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang di lakukan oleh pondok pesantren Ashri Talangsari tidak berjalan dengan baik.

V.2 Saran

1. Kepada Para Pembuat Kebijakan (Policy Maker) dan Dinas terkait

Seyogyanya Keputusan Bupati tidak dikabulkannya permohonan penolakan berdirinya *hypermarket* yang di lakukan oleh pondok pesantren Ashri Talangsari perlu ditinjau kembali. Untuk memperbaiki Keputusan Bupati tersebut hendaknya para anggota dewan yang berkedudukan di Komisi C dan D mempunyai pemikiran yang sama bukan kepentingan-kepentingan politik yang sama dan yang diutamakan.

2. Kepada para pengasuh pondok pesantren Ashri Talangsari

Mempertahankan eksistensi pondok pesantren merupakan amanah yang harus di perjuangkan agar nilai nilai religiusitas pesantren tidak tergerus dengan adanya arus globalisasi. Namun benturan dan hantaman akan banyak di dapat agar keberadaan pondok pesantren bisa survive.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan dkk. (ed.). Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggungjawab Sosial Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Abdullah, Taufik, (ed.). Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES. 1988
- Abdurrahman, Dudung, dkk.. Model Pengembangan Ma'had Aly: Studi Kasus Beberapa Pesantren di Jawa. Laporan Penelitian Kompetitif PTAI. 2004
- Anam, Choirul (ed.). KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup dan Perjuangannya. Surabaya: Sahabat Ilmu. 1994
- Asmuki. Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren Perspektif KHR. As'ad
- Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. 1995
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media. 2007
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. 1981
- Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Harindita, Yogyakarta
- Madjid, Nurcholis. Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina. 1997
- Nugroho, Riant, 2002, *Analisis Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hull, Terence H., et. al., 1997, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 1984, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2006. *metode penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Peraturan Presiden No. 112 Tahun. 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan juga berdasar rancangan

Perda No. 00 Tahun 2012 pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember

Robbins, Stephen P., 1999, *Perilaku Organisasi, Terjemahan*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Samudra Wibawa, dkk., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta Raja.

Singarimbun, Mash dan Sofian E., 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta

Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research , Jilid III*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung

Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. 2005. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sobary, Mohamad. Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999

Suseno, Franz M.. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia. 2001

Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS. 2004

Turner, Bryan S.. Menggugat Sosiologi Sekuler: Studi Analisis atas Sosiologi

Weber (Mudhofir Abdullah. Terjemahan). Yogyakarta: Suluh Press. 2005

Weber, Max. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (Yusup Priyasudiarja. Terjemahan). [t.k.]. Pustaka Prometheus. 2003